

MEDIA KALTIMTARA

KAMIS,
2 NOVEMBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



HARGA BBM NON SUBSIDI TURUN, PENYESUAIAN HARGA DIBERLAKUKAN

BACA HALAMAN 2



POLSEK TARAKAN UTARA
KUNJUNGI SMAN 3,
SOSIALISASIKAN BAHAYA NARKOBA
DAN ETIKA BERLALU LINTAS

BACA HALAMAN 15

Harga BBM non Subsidi Alami Penurunan, Penyesuaian Harga Diberlakukan

TANJUNG SELOR - PT Pertamina Patra Niaga, per 1 November 2023 kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk produk BBM non subsidi, Pertamina Series dan Dex Series. Penyesuaian harga tersebut, mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak, yakni harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS)/Argus serta nilai tukar mata uang Rupiah.

Sedangkan, untuk seluruh produk jenis gasoline atau bensin Pertamina mengalami penyesuaian turun harga, sejak dilakukan penyesuaian harga terakhir pada 1 Oktober 2023.

Pertamax RON 92, turun menjadi Rp 14.000 per liter, dari sebelumnya Rp 14.300. Kemudian, Pertamina Turbo RON 98, turun menjadi Rp 15.800 per liter dari sebelumnya Rp 16.950.

Area Manager Communication, Relations & CSR Kalimantan, Pertamina Patra Niaga, Arya Yusa Dwicandra menyampaikan untuk produk jenis gasoil yakni Dexlite CN 51, mengalami penyesuaian turun harga.

"Saat ini, BBM jenis dexlite dijual seharga Rp 17.300 per liter dari sebelumnya Rp 17.550," ungkap Dwi Chandra, Rabu (1/11/2023).

Pertamina Dex CN 53, kata dia alami penurunan menjadi Rp 18.100 per liter dari sebelumnya Rp 18.250. "Harga ini berlaku untuk seluruh propinsi di Kalimantan, dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen," jelasnya.

Penyesuaian harga tersebut, kata dia mulai diterapkan per 1 November 2023. "Hal ini sudah sesuai dengan penetapan harga yang diatur dalam Kepmen ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi," tukasnya.

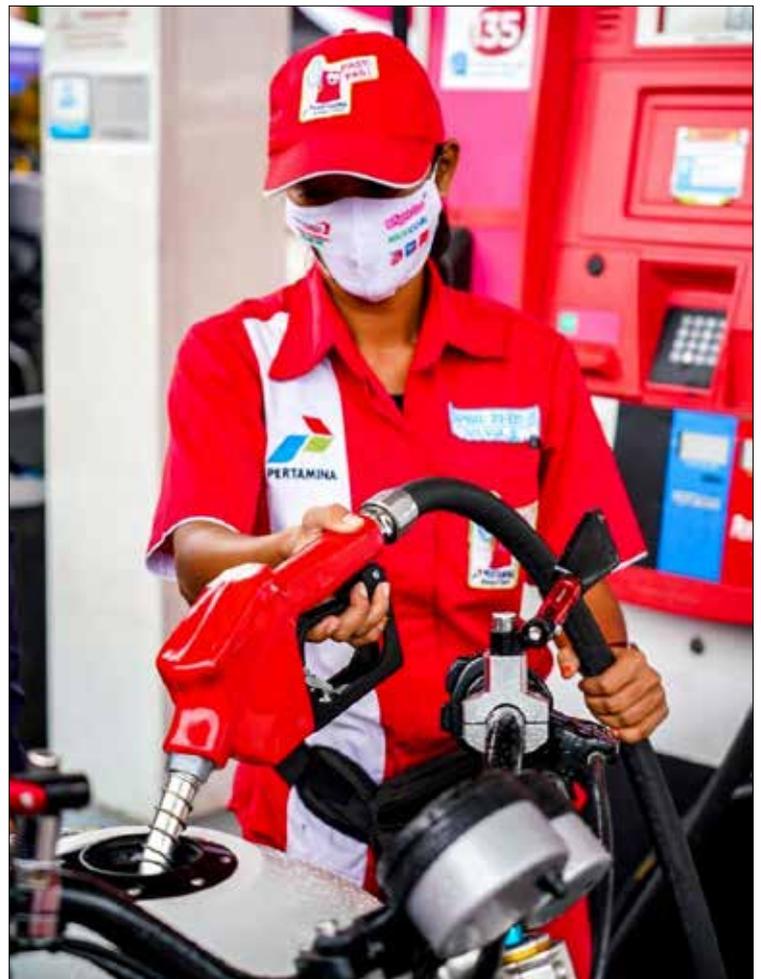
Dia kembali menegaskan, penetapan harga baru ini sudah mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

"Harga produk BBM non subsidi, Pertamina juga dipastikan tetap kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara," ujar Arya.

Harga BBM non subsidi Pertamina mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya minyak mentah, publikasi MOPS dan Kurs, agar Pertamina tetap dapat menjamin penyediaan dan penyaluran BBM hingga ke seluruh pelosok Negeri.

Arya menambahkan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan pendistribusian BBM hingga ke pelosok negeri, pihaknya berkomitmen penuh untuk menyediakan dan menyalurkan BBM berdasarkan prinsip Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability. "Pertamina Patra Niaga berkomitmen menyediakan pasokan produk BBM berkualitas diseluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, namun ke seluruh pelosok negeri, dengan harga yang kompetitif," tandasnya. (tin/and)

Editor: Andhika





Bupati Bulungan Syarwani, menargetkan angka stunting tiap tahun turun.

Zero Stunting jadi Target Bersama

TANJUNG SELOR – Fokus pembangunan pemerintah Bulungan, salah satunya menuntaskan angka stunting di Bumi Tenggulun.

Tak tanggung-tanggung, Pemkab Bulungan menargetkan tahun 2024, bisa zero stunting. Penanganan dilakukan secara masif dengan sosialisasi dan pemberian paket bantuan bagi ibu dan bayi.

Bupati Bulungan, Syarwani menyampaikan pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional, yang telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen pada tahun 2024. Itu juga menjadi target Nasional,” ujar Syarwani, Rabu (1/11/2023).

Untuk di Kabupaten Bulungan, lanjut Syarwani sesuai dengan data operasi timbang pada Agustus 2023,

jumlah balita pendek dan sangat pendek sebanyak 112 orang atau sebesar 16,64 persen dari total balita yang diukur.

Hasil, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, sambung Bupati, tingkat prevalensi stunting di Bulungan menempati angka 18,9 persen. Meski begitu, Pemda Bulungan menargetkan zero stunting. Target tersebut, untuk memastikan kondisi anak di Bulungan sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045.

Dikatakan, titik kerawanan kasus stunting dimulai sejak pra nikah atau pasangan usia subur, kehamilan hingga 1000 hari sejak kelahiran. Untuk mengantisipasi stunting, maka semua pihak, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten harus bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi untuk memastikan kasus stunting tidak terjadi di daerah.

Dirinya berharap, para kepala desa

bisa ikut serta menuntaskan angka stunting lewat alokasi anggaran Dana Desa (DD). “Sehingga rencana pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi stunting bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Imam Sujono mengatakan, ada dua kecamatan yang akan dilakukan intervensi penanganan stunting. Seperti di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Sekatak. “Untuk itu, saya berharap ada peran serta semua pihak. Dalam rangka percepatan penurunan stunting,” terangnya.

Sesuai SSGI 2022, kata dia tingkat prevalensi stunting di Bulungan masih 18,9 persen. Turun dari tahun sebelumnya sebesar 5,1 persen. “Jadi angkanya cenderung membaik dari tahun ke tahun. Dan kita terus berupaya untuk mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah pusat,” tutupnya. (adv/tin/and)



Foto Bersama Anggota DPRD Bontang dan Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang.

Ajak 56 Peserta Belajar Pengelolaan Perpustakaan

SAMARINDA– Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM), pengurus dan anggota Perpustakaan Kelurahan Berbas Pantai, Kota Bontang mengajak 56 peserta untuk belajar mengenai cara pengembangan perpustakaan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim.

Visitasi 56 peserta tersebut turut didampingi oleh anggota komisi III DPRD Kota Bontang, Yasir Arafat, S.Sos.

Rombongan yang tiba di Aula Oemar Dahlan DPKD Kaltim tersebut disambut langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM), Taufik pada Senin (30/10/2023).

Lurah Kelurahan Berbas Pantai, Supriadi merespon positif dengan sambutan hangat DPKD Kaltim yang terbuka menerima kedatangan peserta. Kunjungan ini pun dimulai dengan sesi diskusi dan berkeliling area perpustakaan yang berlokasi di Jalan Ir.H.

Juanda Nomor 4, Samarinda tersebut.

Visitasi menjadi cara bagi pemuda kelurahan yang pimpinnya tersebut untuk membantu promosi dan publikasi Perpustakaan Kelurahan Berbas Pantai agar lebih dekat dengan masyarakat Kota Taman tersebut.

“Kawasan Berbas Pantai rawan akan kejahatan penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba. Melibatkan mereka dengan kegiatan perpustakaan membentuk kegiatan positif yang bermanfaat. Selain itu perpustakaan kami sebelumnya terpilih menjadi Perpustakaan Kelurahan dengan layanan digital terbaik di Indonesia,” jelas Supriadi dalam sambutannya.

Ia melanjutkan dengan prestasi tersebut menjadi pemicu semangat para anggota dan kader perpustakaan untuk terus belajar lebih mendalam mengenai ilmu-ilmu pengelolaan perpustakaan.

Kedatangan mereka ke DPKD Kaltim turut melibatkan andil dari DPRD Kota Bontang Komisi III yang peduli dengan

pencapaian dan kualitas Perpustakaan Kelurahan Berbas Pantai.

Kepala BP3KM DPK Kaltim, Taufik berharap visitasi menjadi langkah pembelajaran bagi pengurus dan kader perpustakaan dalam mengelola perpustakaan.

“Membaca tanpa diimplementasikan hasilnya akan nihil, sebaliknya bila membaca tapi ada manfaatnya untuk hidup itu baru literasi. Ke depannya saya berharap Perpustakaan Berbas Pantai dapat berbasis inklusi sosial dengan menyediakan semakin banyak koleksi buku yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai mata pencahariannya. Misalkan nelayan, ditambah lagi koleksi buku mengenai perikanan dan kemaritiman,” papar Taufik.

Usai melakukan sesi diskusi, agenda visitasi ditutup dengan sesi foto bersama dan mengelilingi layanan dan fasilitas DPKD Kaltim bersama Pustakawan DPKD Kaltim, Winda Fitri Yantie dan Adriansyah. (adv/and)



Tempat penyimpanan arsip permanen.

Depo Arsip Milik DPK Kaltim Didominasi Arsip Lembaga yang Berubah Nomenklatur

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini menyimpan arsip dari 50 lembaga. Akan tetapi, yang terbanyak adalah berasal dari lembaga yang sudah tidak ada lagi akibat perampingan lembaga ataupun pergantian nama (perubahan nomenklatur) yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak era Presiden ke KH Abdurrahman Wahid akibat Kebijakan Otonomi Daerah.

“Jadi kita juga menyimpan arsip dari lembaga yang sudah tidak ada lagi,” ungkap Arsiparis Ahli Muda,

DPKD Kaltim, Risnawati SE MM

Semua arsip tersimpan rapi di depo penyimpanan arsip milik DPKD kaltim yang berada di Jalan Bung Tomo No.130, Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.

“Jadi lembaga- lembaga yang sudah tidak ada itu di antaranya, seperti Kanwil Penerangan sekarang jadi Diskominfo, Kanwil Pendidikan, sekarang berubah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk seperti dulu ada Badan Kearsipan sekarang digabung sama Dinas Perpustakaan, sekarang jadi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan lembaga lainnya yang juga digabung dan dipisah, termasuk juga 13 lembaga era Gusdur itu,” bebernya.

Penyimpanan arsip ini dilakukan sebagai bukti informasi dan sejarah, untuk bisa dijadikan pelajaran dan ilmu pengetahuan buat generasi saat ini dan generasi mendatang.

“Jadi ada 50 lembaga yang tercatat dalam daftar pencipta arsip yang telah menyerahkan ke DPKD Kaltim, dari 50 itu kebanyakan dari lembaga yang sudah tidak ada lagi termasuk 13 lembaga era Gusdur tadi,” tutupnya. (adv/and)



Tempat penyimpanan Arsip DPKD Kaltim.

Nilai Miliki Nilai Sejarah, Selamatkan Arsip Covid-19

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim akan melakukan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 Kaltim selama pandemi dari kurun waktu 2020 hingga 2023

Arsiparis Ahli Muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Risnawati SE MM mengatakan, Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-19 menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

“Karena ini arahan presiden langsung, dan dituangkan dari edaran menteri PANRB. Jadi kami akan mengakuisisi arsip-arsip soal penanganan COVID-19 yang ada di seluruh Kaltim, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dan tahun ini kita sudah datang pemerintah ka-

bupaten dan kota yang ada di Kaltim terkait hal ini,” ungkapnya.

Tujuan Penyelamatan Arsip COVID-19 ini penting karena berkaitan dengan pengelolaan arsip khususnya, Penyelamatan Arsip COVID-19 pada semua pencipta arsip yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dia menambahkan, pandemi merupakan peristiwa sangat langka, oleh sebab itu dua tahun kedepan, Pemerintah Pusat mengamanahkan kepada Pemprov Kaltim untuk mampu menghimpun arsip tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Sangat sayang kalau tidak didokumentasikan dengan baik, kita meninggalkan catatan sejarah bukan semata-mata dokumentasi saja tapi untuk menjadi pembelajaran baik bagaimana bangsa dan Kalimantan Timur mampu mengantarkan warganya selesai pandemi COVID-19. Ini akan menjadi cerita ke depannya,” ungkap Risnawati.

Risnawati mengkilas balik cerita mengenai pengalaman masyarakat dunia dalam menghadapi COVID-19. Di mana seluruh manusia diwajibkan menggunakan masker ketika di luar

rumah, sekolah diliburkan dan belajar secara daring, para pekerja banyak yang menjalankan sistem rolling dan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan masyarakat dilarang berkumpul atau membuat kerumunan.

“Inikan sejarah bukan hanya di Kaltim, tapi juga dunia ya, bahkan saya pun alumni Covid ini, bagaimana saya harus dipisahkan dari keluarga. Tentu ini suatu yang berharga untuk kita arsipkan,” jelasnya.

Bukan hanya soal nilai sejarahnya, penyelamatan arsip COVID-19 ini juga sebagai pertanggung jawaban pemerintah selama penanganan COVID-19. “Secara akuntabel, pemerintah juga wajib melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran COVID-19 kala itu,” tutupnya.

Arsip COVID-19 yang akan diselamatkan adalah dimulai dari arsip tahun 2020 hingga arsip tahun 2023, dan penyelamatan arsip ini paling lambat harus selesai tahun 2026 mendatang. “Tahun 2024-2025 kita target selesai untuk tingkat provinsi dan untuk tingkat kabupaten ditahun 2026,” tutupnya. (adv/and)

Ribuan Arsip Inaktif Berusia 10 Tahun Diserahkan BKD ke DPK

SAMARINDA – Badan Kependidikan Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) lakukan pemindahan arsip inaktif, ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Arsip yang dipindahkan sebanyak 3.000 – 4.000 dan berusia di atas 10 tahun keatas.

“Pihak BKD melakukan pemberitahuan bahwa mereka akan melakukan pemindahan arsip inaktif yang berumur 10 tahun ke atas ke lembaga perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi Kaltim untuk disimpan ke depo Arsip,” ungkap Arsiparis Penyelia DPKD Kaltim, Ana Paliyantisari saat ditemui di ruangnya beberapa hari yang lalu.

Pemindahan ini dikatakan Ana, lantaran record center milik BKD akan direnovasi. Karena tidak punya tempat untuk menyimpan ar-

sipnya maka BKD berinisiatif untuk menyerahkan arsipnya ke depo bagian kearsipan DPKD Kaltim.

“Mungkin mereka ingin menyerahkan ke Kearsipan DPKD Kaltim, karena ingin menyelamatkan arsip ini agar tidak hilang dan rusak,” ujarnya.

Ana menyebutkan sudah menjadi kewajiban DPKD Kaltim untuk menyelamatkan arsip tersebut. Jadi DPKD Kaltim, selain bertugas untuk mengarsipkan seluruh arsipnya sendiri, juga bertugas untuk mengumpulkan seluruh arsip milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan pemerintah tingkat provinsi Kaltim.

“Setelah ada surat permohonan, kita harus segera menerima arsip tersebut,” pungkasnya.

Pemindahan ini tujuannya adalah upaya pengelolaan agar fisik arsip

tetap aman. Selain untuk menyelamatkan, juga akan memudahkan pihak kearsipan DPKD Kaltim saat melakukan penilaian arsip.

“Arsip statisnya perlu adanya pemindaham ke sini dulu. Kita pun akan melakukan penilaian, penyusutan kita dengan melibatkan pencipta arsip dalam hal ini pencipta arsipnya adalah BKD. Nanti didata dan disusun rapi di dalam box, dan ada daftar arsipnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ana mengatakan langkah cepat untuk menerima arsip tersebut adalah pencegahan penumpukan arsip milik BKD.

“Jika ada OPD ingin menyerahkan arsip, karena kalau tidak diterima maka bisa menumpuk di OPD dan bisa saja rusak jika tidak diterima, sebagai DPKD harus segera menerima bisa saja arsipnya hilang dan rusak,” tutupnya. (adv/and)



Arsiparis Penyelia DPKD Kaltim, Ana Paliyantisari

Sambangi DPK Kaltim, DPMPSTSP Mahulu Pelajari Aplikasi Srikandi

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya menerapkan aplikasi Srikandi ke seluruh kabupaten/ kota di Kalimantan Timur sebagai langkah mengikuti kemajuan teknologi pengarsipan dalam tata kelola pemerintah secara digital.

Sebagai informasi, Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Salah satu cara agar setiap pemerintah kabupaten/ kota se-Kaltim merata menggunakan aplikasi Srikandi, pihak DPKD Kaltim mengundang OPD yang ingin lebih mendalami aplikasi tersebut ke Kantor Arsip. Salah satu OPD yang datang ingin mendalami lebih lanjut aplikasi Srikandi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPSTSP) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Hal ini diungkapkan oleh kepala DPMPSTSP Kabupaten Mahulu Merkuria Ping yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian (Kasubag) Naca.

Merkuria mengatakan bahwa kedatanganannya ke DPKD Kaltim untuk lebih mendalami aplikasi Srikandi. “Kami udah pernah ikut pelatihan dengan beberapa OPD, tapi belum maksimal. Jadi kami di sini ingin lebih mendalami aplikasi ini,” ungkapnya.

Aplikasi Srikandi menurut Naca, sangat membantu pemerintah dalam kearsipan terutama untuk Kabupaten Mahulu yang berada di ujung Barat Kalimantan Timur.

“Membantu kita mengerjakan tugas, walaupun lagi berada di luar, apalagi kita yang berada di mahulu, jika ingin bersurat ke Provinsi langsung bisa melalui aplikasi ini, sangat membantu arus surat-menyurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Naca menyebutkan pihaknya membawa beberapa staf

ke DPKD Kaltim untuk mempelajari aplikasi tersebut agar nantinya bisa mengajarkan ke beberapa staf lainnya di kabupaten Mahulu.

“Kita di sini membawa beberapa staf umum dan keuangan, karena nanti kan mereka bisa mengajari staf dan bidang lainnya yang ada di DPMPSTSP,” jelasnya.

Naca berharap ke depan pihaknya sudah menjalankan aplikasi ini, karena arahan dari pemerintah provinsi semua OPD harus bisa menjalankan aplikasi ini di tahun 2025.

“Semoga aplikasi ini bisa digunakan dengan baik, dan kami bisa menerapkan dengan segera,” tutupnya.

Diketahui, Pelatihan aplikasi Srikandi ini diselenggarakan di ruangan aula Kantor Arsip DPKD Kaltim yang berada di jalan Bung Tomo Sungai Keledang, Samarinda Seberang. Pelatihan akan berlangsung selama 2 hari, tampil sebagai Nara sumber Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim Dewi Susanti MM. (adv/and)



Kepala DPMPSTSP Kabupaten Mahulu Merkuria Ping serta jajaran staf.



Salah seorang pengunjung perpustakaan DPK Kaltim saat memanfaatkan buncu baca etam.

Akan Evaluasi Perangkat Buncu Baca Etam

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 43 perangkat Buncu Baca Etam (BBE) yang sebelumnya sudah disebar ke 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM), Taufik pada Senin (30/10/2023).

“Kita akan pemantauan dan evaluasi kembali, ini akan berpengaruh pada kebijakan selanjutnya. Kita akan memantau tingkat penda-

nya. Jika respon animo masyarakat tinggi, kita akan tambah dan distribusikan kembali. Tapi jika tidak, mungkin kita tidak tambah,” ujarnya.

Ada 43 unit BBE yang tersebar pada masing-masing titik lokasi kabupaten dan kota, dan dipastikan tetap kontrol operasional DPKD Kaltim.

BBE diletakkan pada lokasi strategis, di mana masyarakat pada kota maupun kabupaten tersebut berkumpul, BBE menjadi harapan dan alternatif bagi masyarakat guna mengakses bahan bacaan secara digital dengan radius 200 meter dari titik baca.

“Yang pasti ini barang sudah kita distribusikan, unit BBE nya, tinggal kita lihat perkembangannya,” ujarnya.

Taufik berharap semua masyarakat bisa mendukung program BBE ini untuk meningkatkan budaya literasi agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang punya akses dekat dengan lokasi unit BBE ini.

“Kita juga sangat mengajarkan peran dan dukungan masyarakat agar BBE ini bisa disosialisasikan ke masyarakat agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya. (adv/and)



Perwakilan Unmul dan DPKD Kaltim saat menunjukkan bukti tandatangan kerjasama.

Fisipol Unmul dan DPKD Kaltim Jalin Kerjasama

SAMARINDA – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Fisipol Unmul) Samarinda melakukan penandatanganan kerjasama bersama mitra, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD). Prosesi penandatanganan kerjasama berlangsung di Kegiatan di Cafe Busam Area, Jalan Kesuma Bangsa Kompleks GOR Segiri Samarinda pada Senin (23/10/2023).

Pustakawan Ahli Muda DPKD Kaltim I Gede Priadi, menjadi perwakilan DPKD Kaltim dalam kegiatan kerjasama. Gede — sapaan akrabnya, juga mengapresiasi kerjasama yang turut melibatkan Dinas Komuni-

kasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Busam.id, dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI).

“Semakin mudah, kami berupaya meningkatkan literasi dan minat baca di Kaltim dengan kerjasama dengan Unmul ini. Apalagi mayoritas mahasiswa merupakan generasi milenial dan Gen Z, generasi yang dikelilingi segudang informasi dengan cepat dalam pemerolehannya,” papar Gede.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang baru terpilih, Unmul Finnah Furqoniah turut menyambut baik kerjasama yang melibatkan DPKD Kaltim tersebut. Upaya percepatan

edukasi informasi dan peningkatan literasi di kalangan anak muda menjadi fokus pada kerjasama yang melibatkan banyak mitra tersebut.

“Melibatkan media, instansi, dan instansi pendidikan, semoga sinergitas di antara kita semua membawa program dan gerakan yang dapat bermanfaat untuk anak muda. Kawula muda merupakan garda perubahan yang perlu kita dukung setiap langkahnya sembari kita wadah dengan berbagai edukasi untuk kebermanfaatannya,” ucap perempuan yang akrab disapa Finnah tersebut. (adv/and)

Minta Setiap OPD Miliki Tugas Pengelola Arsip

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini masih kekurangan Arsiparis dalam mengelola arsip di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Pemprov Kaltim. Hal ini dikatakan oleh Arsiparis Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim, Risnawati pada Kamis (26/10/2023).

“SDM Arsiparis memang tidak menyeluruh OPD memiliki, saat ini cuma BKD dan BPKAD yang baru punya Arsiparis terbanyak adalah di DPKD,” ungkapnya.

Seharusnya setiap OPD memiliki Arsiparis dalam mengelola kearsipan agar memudahkan dalam membuat rekap arsip yang ada di OPD tersebut.

“OPD itu penting harus punya Arsiparis, seperti Arsiparis terampil dan Arsiparis ahli, jadi minimal 2 orang Arsiparis setiap OPD,” tegas Rusminawati

Jika tidak memiliki Arsiparis, setiap OPD disarankan untuk memiliki petugas unit pengelola arsip, agar tidak terjadi penumpukan arsip. Ke depannya akan memudahkan pihak OPD itu sendiri jika mencari berkas.

“Kalau pun tidak memiliki arsiparis, pihak OPD harus punya petugas unit pengolah arsip, yang ada di bidang-bidang kantor tersebut, petugas ini tidak harus Arsiparis tapi dia bertugas untuk mengarsipkan setiap berkas,” jelasnya.

“Untuk bisa menjadi Arsiparis saat ini sesuai peraturan minimal harus lulusan D3 kearsipan, jadi lulusan diluar kearsipan harus mengikuti pelatihan kearsipan,” ungkapnya.

Arsip seharusnya itu dikelola di setiap OPD. Yang tugasnya, mengelola surat masuk surat keluar, harus diberkas dengan rapi dan dibuat rekap dan daftar arsipnya. Hal ini akan memudahkan pihak OPD dalam pencarian berkas arsip jika diperlukan Kembali.

“Saya berharapnya sih arsip itu terkelola di pencipta arsip, karena jika tidak ada melakukan kelola arsip, tidak melakukan penilaian arsip, maka kami pun bisa tidak punya arsip statis. Maka diharapkan pihak OPD terkait melakukan pengadaan tenaga kearsipan, tentunya harus

berkompeten bidang kearsipan. Terkadang mereka (OPD) itu kesulitan dalam memberkaskan dan membuat daftar arsipnya,” pungkasnya.

Diketahui, Definisi Arsiparis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. (adv/and)



Arsiparis Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim, Risnawati.

Saat Pandemi Covid-19, Jumlah Penduduk di Samarinda Menurun

SAMARINDA – Pandemi COVID-19 memang telah usai, namun masih banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat tentang dampak-dampak yang terjadi, termasuk data kependudukan di kota Samarinda yang tercatat turun drastis. Hal ini dikatakan Arsiparis Ahli Madya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur Risnawati SE MM

“Salah satu yang menjadi hot issue saat penyelamatan Arsip Covid-19 adalah jumlah penduduk Samarinda

yang turun drastis,” ungkapnya, Jumat (27/10/2023).

Hal ini terungkap saat pihaknya melakukan penyelamatan arsip COVID-19. Oleh sebab itu hal ini bisa dijadikan bahan penelitian oleh lembaga penelitian, apakah penurunan angka penduduk ini karena adanya pandemi atau karena perpindahan penduduk.

“Nah makanya ini jadi hot issue. Apakah karena pandemi atau perpindahan penduduk,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jendral (Ditjen) Kependu-

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk di Kota Samarinda ada sebanyak 825,490 ribu jiwa pada Juni 2021. Sedangkan di tahun 2020 hasil sensus penduduk Samarinda adalah sebanyak 827.994 jiwa.

Ada penurunan hampir di angka 3.000 jiwa, penduduk Samarinda berkurang dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini masih memerlukan kajian apakah karena dampak pandemi COVID-19, perpindahan penduduk atau salah perhitungan. (adv/and)



Gelar Perlombaan, bagian dari rangkaian hari pangan Dunia.

Cegah Kelangkaan Air dan Pangan, Dorong Inovasi Panganekaragaman

TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten Bulungan, melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) mengadakan lomba Inovasi Produk Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Sasaran peserta dari perlombaan ini, merupakan siswa-siswi, SMA/SMK sederajat.

Mewakili Bupati Bulungan, Sekretaris Daerah Risdianto, dalam kesempatan itu menyampaikan, keanekaragaman pangan menjadi bagian dari upaya mengatasi tantangan dunia, seperti kelangkaan air, pangan serta energi.

"Perlombaan ini merupakan aksi nyata dalam memperingati Hari Pangan dunia, yang jatuh pada 16 Oktober lalu," ungkap Risdianto, Rabu (1/11/2023).

Peringatan hari pangan Dunia, kata dia mengusung tema *water is life, water is food. Leave no one behind* yang bermakna air adalah Kehidupan, air adalah makanan, jangan tinggalkan siapapun.

Tema ini, bertujuan untuk menyoroti peran penting air bagi kehidupan di bumi serta sebagai sumber makanan. Sekda melanjutkan, pertumbuhan populasi manusia diiringi pertumbuhan perumahan tentunya akan berdampak pada menyusutnya kawasan hijau serta berpotensi menimbulkan kelangkaan air dan pangan.

Begitu pula dengan eksploitasi hasil bumi, yang bisa berdampak pada kelangkaan energi. Untuk itu, dia ingatkan kepada peserta lomba

harus bersama-sama melakukan upaya mitigasi. Dengan mengurangi ancaman dari kelangkaan itu, upaya mitigasi yang dilakukan berupa inovasi panganekaragaman pangan khususnya yang ada di Bulungan.

Diharapkan, kegiatan lomba bukan sekadar seremonial, selain untuk meningkatkan keterampilan, juga dapat meningkatkan semangat semua pihak untuk menjaga lingkungan, menjaga berkah yang sudah diberikan oleh yang kuasa.

"Semoga kegiatan ini bisa menciptakan panganekaragaman pangan lokal, dan dapat diberdayakan oleh warga Bulungan," tandasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Psikolog Fanny E. Sumajouw.

ADE/MKR

Psikolog Sebut Pelaku Pencabulan terhadap Anak Usia 4 Tahun Alami Deviasi Seksual

TARAIAN - Masyarakat Tarakan sempat dibuat geram dengan kasus pencabulan yang dilakukan dua orang pria terhadap anak berusia 4 tahun. Dua pria itu masing-masing berinisial RM (31) dan SK (41) diduga melakukan pencabulan dengan memasukkan sisir dan jari ke area kemaluan korban.

Menanggapi hal tersebut, Psikolog Fanny E. Sumajouw, menduga kedua pelaku memiliki penyimpangan seksual. Kendati belum ada pemeriksaan secara khusus terhadap kedua orang pelaku, namun dari sisi keilmuan dan pengalamannya menghadapi pelaku pencabulan terhadap anak, ia menilai pelaku mengalami deviasi seksual.

“Sebenarnya terkadang orang-orang tidak menyadari, mungkin secara umum atau performansi dia di luar terlihat seperti aman dan tidak ada masalah. Tapi ternyata ujung-ujungnya memang ada masalah,” ucap Fanny di Tarakan, Rabu (1/11/2023).

Psikolog yang akrab disapa Bunda Fanny ini pun menjelaskan, deviasi seksual merupakan penyimpangan seksual. Artinya, seseorang melakukan hubungan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kondratnya.

Misalnya sudah menikah, berhubungan melalui organ intim. Jika konteksnya memasukkan sisir dalam vagina terlebih dilakukan pada anak balita. Menurutnya, hal itu sudah masuk dalam deviasi atau penyimpangan seksual.

“Kalau misalnya pertanyaannya dia pedofil, pedofil dia dari subur saja. Tapi dia tidak aneh-aneh. Tapi kalau sampai benda tajam, garpu, gagang sapu, itu sudah penyimpangan banget. Karena dia tahu fungsi barangnya tidak seperti itu tapi dia memaksakan melakukan kepuasan seksual berdasarkan dari apa yang aneh terlintas di otaknya,” paparnya.

Melihat apa yang dilakukan kedua pelaku, ia menilai cara berpikirnya sudah tidak seperti pada norma yang berlaku. “Sehingga memasukkan apapun sudah masuk deviasi seksual,” sambungannya.

Terlebih, pelaku melakukan hal tersebut kepada anak di bawah umur yang masih berusia 4 tahun. Normalnya, seorang anak di bawah umur bukanlah objek yang bisa diajak berhubungan intim. “Karena belum waktunya dan kedua memang bukan saatnya dan jelas tidak bisa merusak

organ anak seperti itu maka itu jelas deviasi seksual,” tegasnya lagi.

Saat disinggung terkait hukuman yang layak bagi pelaku. Fanny menegaskan bahwa pelaku layak untuk dihukum seumur hidup. “Jelas ga layak. Mereka saja gak bisa bisa perlakuan anak-anak secara layak. Bagaimana mereka harus diperlakukan layak,” tegasnya.

Fanny menilai hukuman seumur hidup lebih adil ketimbang hanya dikebiri, sebab pelaku masih bisa lepas. “Mereka masih bisa bebas setelah masa tahanan usai. Tapi jika seumur hidup, maka membusuklah di penjara. Jangan sampai dia jadi momok lagi bagi anak-anak lain atau muncul korban baru,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dua orang pria diamankan Satreskrim Polres Tarakan lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap anak perempuan berusia 4 tahun. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluhkan kepada ibunya bahwa ia mengalami rasa sakit di bagian kemaluannya. Korban mengaku bagian kemaluannya telah dimasukkan jari dan sisir oleh kedua pelaku. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia
Editor: Andhika



ADE/MKR

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tanaman Hayati, Nur Asia.

Tarakan Miliki 627 Hektare Lahan Mangrove, Terluas Ada di Tarakan Utara

TARAKAN - Kota Tarakan memiliki lahan mangrove seluas 627 hektar. Lahan mangrove terluas berada di Tarakan Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Tanaman Hayati, Nur Asia di Tarakan, Selasa (31/10/2023).

"627 hektar tersebar di empat Kecamatan. Paling luas ada di Tarakan Utara kemudian disusul di Tarakan Timur," ungkap Nur Asia.

Ia mengungkapkan berdasarkan citra satelit, ada sekitar 40 hektar lahan mangrove terbuka. Dijelaskannya, hal ini terjadi karena adanya pembukaan lahan oleh masyarakat. Baik untuk kegiatan pembangunan ataupun mengalami abrasi.

Nur Asia lanjut menjelaskan, se-

mestinya lahan mangrove berjalan sesuai dengan fungsinya. Tidak ada pembukaan lahan yang dapat merusak alam. "Kalau masuk dan ditetapkan sebagai kawasan mangrove harusnya dijaga dan tidak boleh dirusak,"katanya.

Ia menilai pemeliharaan pohon mangrove sangat diperlukan guna memastikan ekosistem tetap terjaga. "Pemeliharaan atau perawatan pohon mangrove ini sangat perlu. Ini juga menjadi tugas kami dan masyarakat," ucapnya.

Pemerintah Kota Tarakan, kata Nur, berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang baik. Guna mencapai hal tersebut, maka ekosistem alam harus dijaga. Ia meminta seluruh stakeholder terkait untuk ikut terlibat dalam mewujudkan

lingkungan yang baik. Salah satunya dengan melakukan penanaman pohon mangrove.

Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup. Yakni sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai. Dengan kata lain tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai.

"Pemerintah Kota Tarakan akan selalu mendukung kegiatan penanaman mangrove.

Hal ini selaras untuk menjadikan Tarakan maju dan sejahtera sesuai visi melalui Smart City,"pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia
Editor: Andhika



Polsek Tarakan Utara melakukan sosialisasi di SMAN 3.

ADE/MKR

Polsek Tarakan Utara Kunjungi SMAN 3, Sosialisasikan Bahaya Narkoba dan Etika Berlalu Lintas

TARAKAN – Polsek Tarakan Utara melakukan sosialisasi dengan menyasar kalangan pelajar di SMAN 3 Tarakan Jalan P. Aji Iskandar Rt 8 Kelurahan Juata Kerikil Kota Tarakan, pada Rabu (1/10/2023) pagi tadi. Kegiatan sosialisasi menyampaikan beberapa hal, salah satunya bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kapolsek Tarakan Utara, IPTU Triyono mengatakan narkoba memiliki dampak yang sangat negatif. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi atensi dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Salah satu dampaknya adalah menurunkan kesadaran yang berujung pada hilangnya ingatan dan menimbulkan ketergantungan.

Triyono memaparkan faktor penyebab penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya pemahaman agama. Selain itu, minimnya pengawasan dari orang tua. “Kemudian kurang mendapat kasih sayang orang tua, pergaulan bebas, lingkungan yang buruk dan keinginan untuk sekedar mencoba,” paparnya lagi. Dia menegaskan penyalahgunaan

narkoba memiliki banyak dampak negatif, di antaranya gangguan terhadap daya ingat, malas berpikir, menggerakkan anggota tubuh dengan tidak normal, berperilaku agresif hingga mengalami masalah gigi yang parah.

Adapun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, menurutnya dapat dicegah dari lingkungan keluarga, dengan memberikan kasih sayang dan perhatian serta menanamkan norma dan moral sejak dini. Kemudian dari lingkungan sekolah dengan memberi edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba.

“Lingkungan masyarakat, laporkan kepada pihak yang berwajib jika menemukan hal yang mencurigakan terkait narkoba,” katanya.

Selain menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba, Polsek Tarakan Utara juga membahas pentingnya etika berlalu lintas. Aturan berlalu lintas, kata dia, tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, terdapat pula pada Un-

dang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

“Tujuan UU LAJ nomor 22 Tahun 2009 terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga apa yang harus dilakukan sebagai pengendara bermotor tentunya sebelum berkendara, pertama pastikan kondisi fisik sehat dan kedua siapkan surat surat penting,” paparnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam etika berlalu lintas adalah melakukan pengecekan dan memastikan semua komponen mesin berfungsi dengan baik.

“Jangan lupa selama di perjalanan perhatikan situasi pada saat keluar ke jalan raya, perhatikan rambu-rambu dan taat aturan lalu lintas, selalu memperhatikan batas kecepatan dan menjaga jarak aman dan peduli terhadap keselamatan lalu lintas diri sendiri dan orang lain,” pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



INVESTASI DI IKN CAPAI RP45 TRILIUN, JOKOWI: BERGULIR CEPAT!

BACA HALAMAN 2-3



**BERAU EXPO 2023 RESMI DIBUKA,
HARAP JADI TITIK PULIH UMKM
DAN PEREKONOMIAN**

BACA HALAMAN 29



Investasi di IKN Capai Rp45 T, Jokowi: Bergulir Cepat!

NUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim investasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sangat cepat, dan diperkirakan akan mencapai Rp45 triliun hingga Desember 2023.

“Ini memang semakin banyak yang berbondong-bondong, terutama investor dalam negeri. Saya kira kece-

patannya cepat sekali,” ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerja untuk meresmikan pembangunan sejumlah proyek konstruksi di kawasan IKN, Rabu (1/11/2023).

Sejumlah infrastruktur yang akan dibangun antara lain tiga rumah sakit, empat hotel, dua mal, serta sejumlah fasilitas pendidikan. “Artinya ini ber-

gulirnya sangat cepat dan saya harap Pak Ketua Otorita IKN (Bambang Susantono) bisa melayaninya dengan cepat, karena swasta juga mintanya dengan cepat,” tutur Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah terlebih dahulu menggerakkan investasi dari dalam negeri untuk tahap awal pembangunan IKN.

Sementara untuk zona-zona besar seperti pusat keuangan (financial center) dan pusat kesehatan, kata dia, mungkin akan mengundang investasi luar negeri. "Ya ini memang kita mengerem (dari luar negeri), dari dalam negeri dulu yang menggerakkan," tutur Jokowi.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga bekerja sama dengan Tony Blair Institute for Global Change untuk urusan yang berkaitan dengan investasi pendidikan di IKN.

Jokowi memperkirakan bahwa pembangunan IKN sepenuhnya akan membutuhkan waktu 15-20 tahun, dan dengan masuknya investasi swasta maka prosesnya bisa lebih cepat. "Terutama setelah selesai yang namanya Tol Balikpapan Nusantara, dan Bandara Nusantara itu akan mempercepat investasi di Ibu Kota Nusantara," kata dia.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap II IKN dilaksanakan pada 1-3 November 2023. Pada groundbreaking kali ini, nilai investasi yang berhasil terserap sekitar Rp12 triliun untuk 10 proyek.

Sementara pada groundbreaking tahap pertama, sejumlah proyek senilai Rp23 triliun mulai dibangun di IKN. Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan pendanaan 10 proyek yang termasuk dalam groundbreaking tahap kedua berasal dari APBN maupun swasta, yang mencakup pembangunan rumah sakit, mal yang terintegrasi dengan hotel dan apartemen, beberapa kantor pe-

merintah, Pulau Suaka Orangutan, Bandara IKN, dan sekolah negeri maupun internasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peletakan batu pertama "groundbreaking" untuk menandai pembangunan hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Rabu.

Pembangunan proyek superblok apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan tersebut dilakukan oleh PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) melalui entitas anaknya, PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA).

"Dengan mengucapkan 'bismillah-irrahmanirrahim' pada siang hari ini 'groundbreaking' Pakuwon Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi saat meresmikan groundbreaking proyek Pakuwon Nusantara di kawasan IKN, Kalimantan Timur, seperti disaksikan dalam video dari Jakarta, Rabu.

Presiden pun mengapresiasi Pakuwon Nusantara yang sudah merancang bangunan untuk apartemen, hotel, dan mal yang akan meramaikan sejumlah pembangunan infrastruktur dan fasilitas di IKN.

Pada hari yang sama, Presiden Jokowi telah meresmikan "groundbreaking" pembangunan Bandara VVIP IKN dan rumah sakit.

Kementerian PUPR juga tengah membangun jalan tol akses menuju IKN yang hanya membutuhkan waktu sekitar 45-50 menit dari Balikpapan.

Presiden Jokowi menjelaskan bah-

wa pembangunan jalan tol yang sudah mencapai progresnya sebesar 55 persen itu memiliki lebar 3 lajur di tiap sisi jalan.

"Jalannya, jalan tol-nya sangat lebar. Berapa meter Pak? Tiga line kanan, tiga line kiri. Artinya kayak Tol Jagorawi segede itu kira-kira. Akan selesai nanti kira-kira di bulan Juni 2024," kata Jokowi.

Sementara itu, Bandara VVIP IKN yang menelan anggaran sebesar Rp4,2 triliun juga diperkirakan selesai pembangunannya dan didarati oleh pesawat pada Juni 2024.

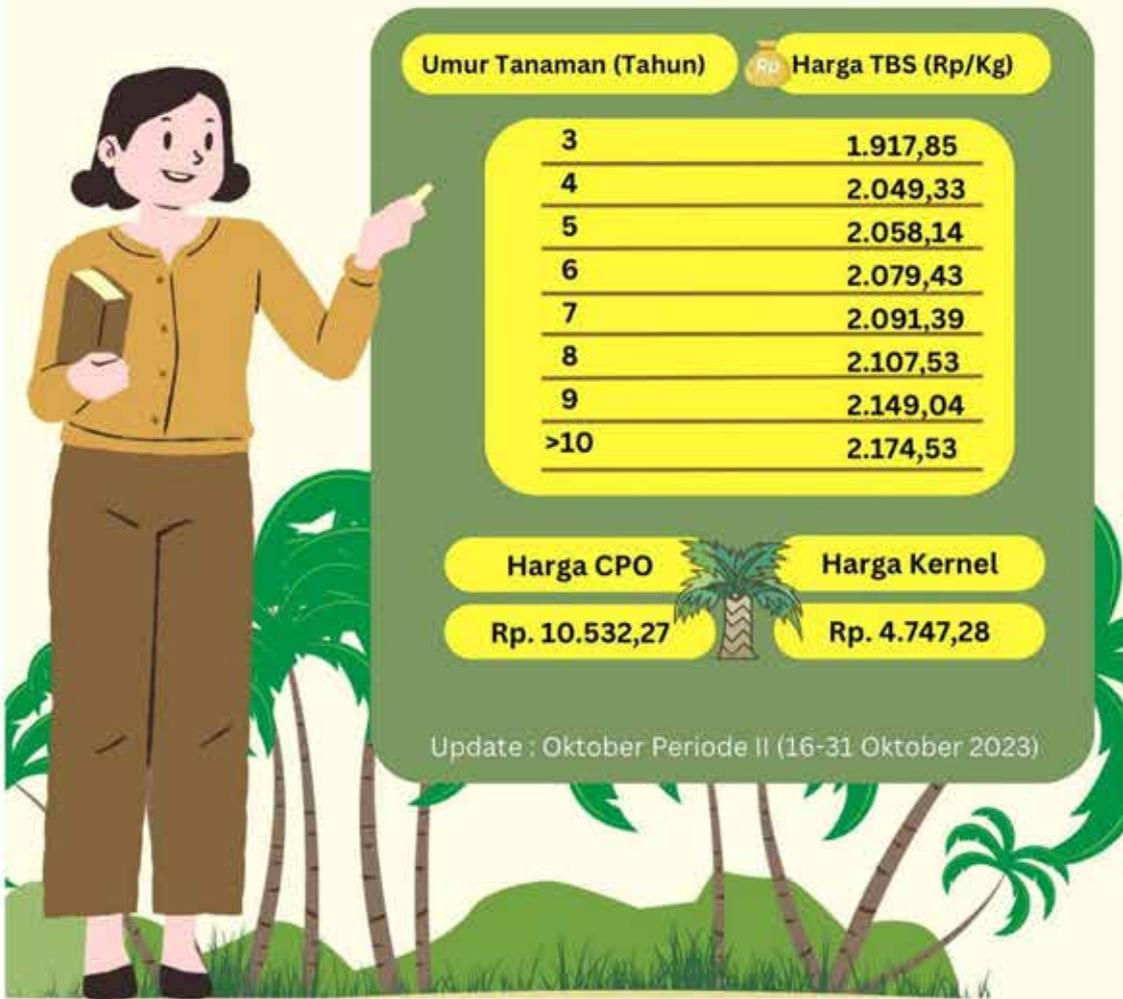
Kepala Negara meyakini selesainya pembangunan bandara dan jalan tol akan membuat investor berbondong-bondong ke IKN. Oleh karena itu, ia meminta agar para investor dalam negeri tidak ketinggalan momentum untuk menanamkan modal. "Kalau dua ini selesai jalan tol-nya rampung, airport-nya selesai, saya yakin kalau yang terlambat memulai investasinya di Ibu Kota Nusantara, bapak ibu akan ketinggalan," kata Presiden.

Presiden menambahkan bahwa "groundbreaking" selanjutnya akan dilakukan untuk delapan hingga sembilan proyek di IKN yang diresmikan pada Desember.

"Bulan Desember saya diperintah untuk ke sini lagi karena akan ada 'groundbreaking' beberapa Pak kira-kira? Delapan (sampai) sembilan lagi yang baru akan memulai, dan kita berharap ini akan terus meramaikan Ibu Kota Nusantara kita," kata Jokowi. (ANT/MK)



Informasi Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra



Umur Tanaman (Tahun)	Harga TBS (Rp/Kg)
3	1.917,85
4	2.049,33
5	2.058,14
6	2.079,43
7	2.091,39
8	2.107,53
9	2.149,04
>10	2.174,53

Harga CPO	Harga Kernel
Rp. 10.532,27	Rp. 4.747,28

Update : Oktober Periode II (16-31 Oktober 2023)

@disbunkaltim disbun.kaltimprov.go.id

KALTIM BERDAULAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

KOMODITAS	PETANI/ PRODUSEN	PENGECEP/ PENGUMPUL
KARET	Rp.8.800/kg k3 50-50%	Rp.12.000/kg
LADA PUTIH	Rp.55.000/kg	Rp.97.000/kg
KELAPA TUA	Rp.5.700/bj	Rp.7.200/bj
KELAPA MUDA	Rp.8.700./bj	Rp.9.500/bj
BIJI KAKAO	Rp.28.000/kg	Rp.32.00/kg
GULA MERAH AREN	Rp.28.800/kg	Rp.30.200/kg

*Harga rata-rata komoditi perkebunan Kabupaten/Kota

Sistem Informasi Pasar Produk Perkebunan Unggul

- Indikasi Karet K3 100% Rp.21.642/kg
- Indikasi Karet K3 85% Rp.18.396/kg
- Indikasi Karet K3 50% Rp.9.200/kg

TBS Kelapa Sawit Pemertapan Harga Provinsi Bagi Perkebunan Bermitra Periode II (16 sd 31) bulan September 2023 Berdasarkan Umur Tanaman

Harga TBS Umur > 30 Tahun Rp.2.194,53/kg

Minggu Ke III bulan Oktober 2023

INFORMASI HARGA INDIKASI KARET

Tanggal 24 Oktober 2023

- 01 Informasi Harga Indikasi Karet Provinsi Kalimantan Timur Berbagai Tingkatan Kadar Karet Kering (K3)
- 02 Dasar Perhitungan Harga Indikasi Karet adalah Harga SICOM (Singapore Commodity) Hari ini pada Technically Specified Rubber (TSR20/ Standard Indonesia Rubber (SIR20)
- 03 Harga SICOM hari ini : 145.4 US Cent
Kurs Rupiah Kisaran : Rp.15.263
Harga Dasar / FOB : Rp.23.064 X 85%
Rp.19.604

KONDISI KARET	Harga / kg
Harga Jalan Pabrik/K3 100%	Rp.18.000 - Rp.19.000
HARGA KARET KERING STOK GUDANG 15 HARI LEBIH K3 70%-75%	Rp.13.750 - Rp.14.750
HARGA KARET KERING STOK GUDANG K3 60%-69%	Rp.12.800 - Rp.13.600
HARGA KARET KERING STOK GUDANG TINGKAT PETANI/UPPB K3 60%-64%	Rp.11.800 - Rp.12.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI/UPPB K3 55%-59%	Rp.10.800 - Rp.11.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 50%-54%	Rp.9.800 - Rp.10.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 45%-49% PANEN 2-3 HARI	Rp.8.800 - Rp.9.600
HARGA KARET BASAH TINGKAT PETANI K3 40%-44% (BARU PANEN)	Rp.7.800 - Rp.8.600



ISTIMEWA

Pembangunan saluran irigasi di Desa Loh Sumber.

Irigasi Sepanjang 6 Km Dikerjakan Desa Loh Sumber Tahun Ini

TENGGARONG - Pembangunan irigasi di Kecamatan Loa Kulu terus dikebut, mengingat menjadi salah satu kawasan pengembangan pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satunya di Desa Loh Sumber. Sepanjang Oktober 2023 ini, sudah ada 4 pembangunan irigasi dan seluruhnya tersambung.

Dijelaskan Kepala Desa (Kades) Loh Sumber, Sukirno, sudah hampir 80 persen jaringan irigasi di desanya tersambung. Memastikan aliran air untuk ke sawah-sawah milik warganya bisa teraliri dengan baik. Disamping juga untuk mengantisipasi jika memasuki musim kemarau.

"Untuk pembangunan irigasi tahun ini, Desa Loh Sumber menerima

pembangunan kurang lebih 6 km," ujar Sukirno.

Tentu saja pembangunan hingga normalisasi yang dilakukan, mulai dirasakan manfaatnya oleh petani Desa Loh Sumber. Setidaknya ada 9 kelompok tani (poktan) di 4 Rukun Tetangga (RT) yang terdampak langsung. Yakni di RT 5 ada sepanjang 2 km, RT 6 ada sepanjang 1,5 km, di RT 8 hingga ke RT 9 ada irigasi sepanjang 2 km lebih.

"Kita juga akan melakukan normalisasi irigasi pada bulan Oktober sampai November 2023 nanti. Dan sudah dipastikan seluruh irigasi itu tersambung dengan aliran air normal," lanjut Sukirno.

Dengan pembangunan dan nor-

malisasi irigasi ini, Sukirno berharap bisa menambah musim tanam. Yang semula 2 kali musim tani dalam setahun yang masih menggunakan teknik tadah hujan. Kini bisa mencapai 3 kali musim tanam dalam setahun, karena memanfaatkan sistem pertanian irigasi dan embung.

"Selain itu dengan tersambungnyanya seluruh irigasi itu akan mengentaskan persoalan-persoalan pengairan yang ada. Paling utama petani tidak akan khawatir lagi dengan persoalan pengairan pertanian padi sawah," tutup Sukirno. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Pemkab Kukar Sedang Siapkan Dua Kecamatan Sebagai Daerah Transmigrasi



ISTIMEWA

Plt Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), kini sedang menyiapkan dua kecamatan di hulu sebagai daerah transmigrasi. Yakni masing-masing Kecamatan Kota Bangun dan Tabang. Seperti yang disampaikan Plt Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto.

Bahkan sudah dilakukan survei ke lapangan kemudian ditindaklanjuti dengan Focus Group Discussion (FGD), pada pekan lalu. Sebagai bentuk percepatan perencanaan pembangunannya.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersejarah bagi Kutai Kartanegara dimana rencana kawasan transmigrasi yang akan ditetapkan merupakan langkah penting dalam penetapan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dafip belum lama ini.

Menjadikan dua kecamatan tersebut menjadi daerah transmigrasi, dirasa sangat baik dilakukan. Karena sebagai proses menyebarluaskan proses pembangunan. Tentunya juga berdampak langsung kepada dua kecamatan tersebut.

Maka dari itu, Pemkab Kukar sedang melakukan pemetaan kawasan transmigrasi di dua kecamatan tersebut. Juga menggali gagasan dari para ahli dan pemangku kepentingan masyarakat.

“Ini juga akan menjadi landasan penting dalam perencanaan yang solid dan berkelanjutan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kutai Kartanegara,” tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Pemdes Loh Sumber Kebut Pengerjaan Semenisasi Jalan Sepanjang 600 Meter

TENGGARONG - Setelah menunggu hampir 3 tahun, akhirnya jalan poros di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, mulai dikerjakan. Pengerjaan yang merupakan peningkatan kualitas jalan ini, setidaknya menghubungkan Desa Loh Sumber, dengan beberapa desa lainnya di Kecamatan Loa Kulu.

Total jalan sepanjang 600 meter yang melewati 2 RT, menjadi sasaran perbaikan. Dimana kondisi jalan yang ditingkatkan, mengalami kerusakan yang berupa spot-spot. Meski diakui, pengerjaan dilakukan belum tuntas hingga jalan yang berbatasan langsung dengan Desa Jembayan Tengah ini, namun dirasa sangat ditunggu perbaikannya.

“Sifatnya bertahap, dan informasi yang saya komunikasikan dengan Dinas PU Kukar, nanti lanjutan semenisasi yang ada akan dilaksanakan di APBD murni 2024,” jelas Kepala Desa (Kades) Loh Sumber, Sukirno.

Diketahui, akses jalan di Desa Loh Sumber ini akan menyambungkan 4 desa lainnya. Masing-masing Desa Jembayan Tengah, Desa Jembayan Dalam, Desa Sungai Payang dan Desa Lung Anai. Maka dari itulah, ia terus mendorong agar konektivitas jalan ini bisa segera rampung dikerjakan.

Peningkatan jalan sendiri, dilakukan dengan semenisasi. Dengan lebar jalan mencapai 5,5 meter dan tebal semenisasi 20 cm. Sebelumnya berupa jalan aspal, meski sempat disemenisasi di beberapa titik yang dianggap sudah rusak parah. “Jalan sepanjang 600 meter ini melintasi 2 RT, yakni RT 5 dan RT 6,” tutup Sukirno. (adv)



STIMEWA

Kades Loh Sumber, Sukirno

Penulis : Muhammad Rafi'i



Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis

Raport Merah untuk OPD Kaltim, Pj Gubernur Minta Kinerja Digenjot

SAMARINDA -Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik tidak akan memberi toleransi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki serapan anggaran rendah. Ia akan memberikan raport merah sebagai bentuk evaluasi dan sanksi.

Hal ini disampaikan Akmal Malik menyusul rendahnya realisasi capaian anggaran pada kinerja OPD di Kaltim. Hingga saat ini, serapan anggaran masih di bawah 58 persen.

"Kita tidak main-main dengan OPD yang tidak mampu menyerap anggaran dengan baik. Kita akan beri raport merah dan tindak lanjut sesuai aturan," tegas Akmal Malik.

Sikap tegas Pj Gubernur ini mendapat dukungan dari Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis. Ia menilai bahwa raport merah perlu diberikan agar OPD bisa bekerja lebih baik lagi.

"Saya setuju Pj Gubernur kasih raport merah, apalagi kalau realisasinya masih di bawah 50 persen. Ini kan menyangkut pelayanan kepada masyarakat," ujar Legislator yang kerap di sapa Nanda tersebut.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa APBD Kaltim tahun 2023 mencapai angka fantastis sebesar Rp25,32 Triliun. Angka ini, kata Nanda, se-

harusnya menjadi motivasi bagi OPD untuk menggenjot kinerja lebih maksimal lagi.

"APBD Kaltim tahun ini meningkat jadi Rp25,32 Triliun. Itu angka luar biasa loh bagi Kaltim. Harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuh Politisi PDI Perjuangan.

Selain raport merah, Pj Gubernur juga berencana akan memberi pendampingan dan pembinaan pada OPD-OPD di Kaltim agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat dan efektif. **(eky/advdprdkaltim)**



Proses pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim dari Fraksi PKB dan PKS di gedung Aula Kantor DPRD Kaltim.

Ketua DPRD Kaltim Lantik 2 Anggota PAW dari Fraksi PKB dan PKS

SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim dari Fraksi PKB dan PKS di gedung Aula Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (31/10/2023).

Ketua DPRD Kaltim Ir. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut yang membuka rapat paripurna ini mengungkapkan

bahwa hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan dan pemberhentian pimpinan /anggota DPRD provinsi.

"Pelantikan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Kaltim pada sisa masa jabatan tahun 2019-2024," jelasnya.

Dua anggota DPRD yang baru

dilantik akan mengisi komposisi anggotanya dari masing-masing fraksi. Adapun anggota DPRD yang akan di-PAW yakni, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Puji Hartadi digantikan Selamat Ari Wibowo dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Masykur Sarmian akan digantikan Encik Wardani. **(ADV/Han/DPRD)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Raperda Trantibum Siap Uji Publik, Aturan Ketertiban Bakal Diperketat

SAMARINDA - Pansus DPRD Kaltim yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum), sudah memasuki tahap finalisasi draft.

Ketua Pansus, Harun Al Rasyid, mengatakan bahwa draft raperda sudah rampung dan siap untuk diuji publik pada 5 November mendatang.

"Kami sudah menyelesaikan draft raperda ini dengan melibatkan OPD terkait. Kami akan melanjutkan prosesnya sampai pengesahan," kata Harun, Selasa (31/10/2023).

Harun menjelaskan, Raperda Trantibum berisi 13 ketentuan yang berkaitan dengan ketertiban di berbagai aspek, seperti jalan, sungai, sekolah, lingkungan sosial, dan kawasan tanpa rokok.

"Ketentuan-ketentuan ini akan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjaga ketertiban. Kami sudah merancanganya dengan baik dalam draft raperda," ujarnya.

Harun menambahkan, Raperda Trantibum juga mengatur sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan. Sanksi tersebut bisa berupa denda atau sanksi administratif, tergantung dari hasil persidangan nanti.

"Kami berharap Raperda Trantibum ini bisa memberikan dampak positif bagi ketertiban dan perlindungan masyarakat. Kami optimis bisa mengesahkan raperda ini pada 16 November," pungkasnya. (eky/adv/dprdkaltim)



Ketua Pansus Trantibum DPRD Kaltim, Harun Al Rasyid

Ketua Fraksi PKB Kritik Gedung Baru Inspektorat Daerah dan Kadrie Oening Tower



Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syafruddin

SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syafruddin, menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi gedung baru Inspektorat Daerah dan Kadrie Oening Tower yang diduga mengalami kemiringan dan kerusakan.

Dalam pernyataannya di Samarinda, ia menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut tampaknya tidak memenuhi standar kelayakan yang diharapkan. "Proyek-proyek ini harus dievaluasi karena tidak mematuhi standar yang ada. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus lebih ketat dalam pengawasan," ujar Syafruddin, usai melakukan tinjauan lapangan, (1/11/2023).

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini, menambahkan bahwa akan ada rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

Ia juga menyoroti pentingnya pengujian struktural gedung-gedung tersebut untuk menghindari risiko yang lebih besar, termasuk kemungkinan korupsi. "Kami akan memanggil semua pihak terkait, termasuk PT Raka yang bertanggung jawab atas pembangunan Kadrie Oening Tower," tambahnya.

Proyek lain yang mendapat sorotan adalah Rumah Sakit Korpri, yang desainnya dinilai tidak sesuai dengan standar rumah sakit. Syafruddin mengkritik kualitas bangunan tersebut dan menuntut perbaikan segera untuk memastikan keselamatan masyarakat. "Kami tidak akan tinggal diam jika ada proyek yang merugikan rakyat. Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa setiap proyek dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Syafruddin dalam penutupannya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Pelantikan Anggota DPRD Kaltim, Encik Wardani dari Fraksi PKS dan Selamat Ari Wibowo dari Fraksi PKB, pada Rapat Paripurna ke-39 DPRD Kaltim, Rabu (1/11/2023).

Pasca Dilantik, Ini yang Bakal Dilakukan Encik Wardani dan Selamat Ari Wibowo

SAMARINDA - Dua anggota baru DPRD Kaltim, Encik Wardani dari Fraksi PKS dan Selamat Ari Wibowo dari Fraksi PKB, dilantik dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Kaltim, Rabu (1/11/2023). Keduanya menggantikan anggota sebelumnya yang diberhentikan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

Encik Wardani dan Selamat Ari Wibowo merupakan calon legislatif (caleg) yang mendapat suara terbanyak kedua di daerah pemilihan (dapil) Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar). Mereka berjanji akan menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik dan aktif.

Encik Wardani mengaku senang dengan pelantikannya sebagai anggota DPRD Kaltim. Ia menganggap ini sebagai momen bersejarah bagi dirinya dan partainya. Ia berharap dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam mendukung program-program positif.

"Semoga ini jadi kolaborasi efektif agenda saya untuk mendukung program positif Pemerintah Provinsi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan untuk memenangkan PKS maupun

yang lainnya," kata Encik Wardani.

Ia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan fraksinya untuk memaksimalkan program-program yang ada. Salah satu isu yang menarik baginya adalah bagaimana anak muda bisa mengelola aset daerah yang selama ini kurang dimanfaatkan.

"Salah satu isu yang menarik adalah bagaimana anak muda bisa mengelola aset daerah yang selama ini mungkin masih minim peran pemuda," tuturnya.

Selamat Ari Wibowo juga menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi warga Kukar sebagai dapilnya. Ia mengatakan bahwa itu akan menjadi tugas pertamanya sebagai anggota DPRD Kaltim.

"Jadi langkah selanjutnya kita akan memperjuangkan aspirasi warga yang kita wakili dari daerah pemilihan," ungkapnya.

Ia juga menargetkan untuk bisa membangun desa lebih baik lagi dengan menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Ia menginformasikan bahwa ada

peraturan gubernur yang membatasi nilai bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten dan kota sebesar Rp 2,5 miliar.

"Kalau tidak salah informasi, hari ini ada peraturan gubernur membatasi bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten dan kota yang itu mengharuskan nilainya Rp 2,5 miliar," pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa pelantikan ini berdasarkan usulan fraksi dan keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Ia berharap agar keduanya dapat mewakili dan memberi dampak positif bagi dapilnya.

"Kami lakukan pelantikan PAW atas dasar usulan fraksi dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kami berharap, dua daerah itu bisa diwakili dan berdampak baik untuk legislatif," tutup Seno. **(Eky/Adv/DPRDKaltim)**

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



DOK MK

Maraknya Destructive Fishing, membuat Legislator DPRD Kaltim mendorong Pemprov melakukan pengawasan.

Nelayan Tradisional di Berau Keluhkan Destructive Fishing

SAMARINDA - Kelompok Nelayan Marlin, yang merupakan nelayan tradisional di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mengirimkan surat terbuka kepada Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta perlindungan dari praktek destructive fishing yang merusak sumber daya laut dan lingkungan.

"Surat ini berisi keluhan tentang penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, setrum, dan alat tangkap yang merusak lingkungan," terang Anggota Komisi I DPRD Kaltim M. Udin.

Surat tersebut menyebutkan bahwa ada nelayan yang menggunakan bahan kimia, bahan peledak,

setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan untuk menangkap ikan di wilayah operasi mereka. Praktek ini telah mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang dan menurunkan kualitas dan kuantitas ikan.

"Ini adalah permintaan yang sangat penting untuk melindungi lingkungan laut dan mata pencaharian kelompok nelayan tradisional di Kaltim," kata Udin belum lama ini.

Kelompok Nelayan Marlin sendiri menggunakan metode tangkap ikan yang ramah lingkungan seperti pancing dan rawai. Mereka mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak mereka.

Legislator Golkar tersebut mengatakan bahwa ia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku destructive fishing. Ia juga berharap pemerintah provinsi dapat mengirimkan agen-agen mandiri ke lokasi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum tanpa harus berkoordinasi dengan aparat lokal yang dinilai tidak efektif.

"Sebagai langkah meminta untuk melindungi lingkungan laut dan mata pencaharian kelompok nelayan tradisional di Kaltim," pungkasnya. **(Eky/Adv/DPRDKaltim)**

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



SUMBER FOTO: HUMAS

Groundbreaking Bandar Udara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (1/11/2023).

DPRD Kaltim Apresiasi Groundbreaking Bandara IKN, Jadi Akses Pendukung Menuju Nusantara

PENAJAM - Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara Groundbreaking Bandar Udara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (1/11/2023).

Yusuf Mustafa memberikan apresiasi dengan adanya pelaksanaan groundbreaking yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Berarti kita ada bandara baru lagi yang ada di IKN ini untuk mendukung kegiatan IKN, intinya di situ. Karena biar bagaimanapun, dengan luas 347 hektare, luasnya sangat luar biasa,” ujar Yusuf Mustafa saat ditemui usai acara.

Menurutnya, arah pembangunan ini bukan untuk satu atau dua tahun melainkan lima puluh tahun ke depan. Karena nantinya dari bandara ini akan banyak dihadiri oleh pejabat-pejabat negara.

“Mengenai sektor ekonomi, akan bergerak juga ini, khususnya dalam sektor pariwisata akan bergerak juga dengan adanya IKN ini. Dan kita sangat mendukung dengan adanya bandara ini,” sebut politisi partai Golkar ini.

Ia berharap dengan adanya IKN dapat meningkatkan geliat ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja khususnya untuk tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dari Kaltim.

“Karena Kaltim mendukung, dengan

adanya ibu kota, harapan kita bisa menggeliatkan ekonomi, menyerap tenaga kerja khususnya untuk putra-putra Kaltim,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam acara, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto, dan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

Samarinda dan Balikpapan Siap Jadi Mitra IKN, Bagus Susetyo: Perbaiki Infrastruktur dan Hunian

SAMARINDA- Kota Samarinda dan Balikpapan diproyeksikan sebagai daerah mitra yang akan terlibat dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini membuat Anggota III DPRD Kaltim, Bagus Susetyo, mengingatkan pentingnya memperbaiki infrastruktur dan penyediaan hunian di dua kota besar tersebut.

Menurut Bagus, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN tidak hanya akan tinggal di wilayah ibu kota baru, tetapi juga berpotensi menyebar ke Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota ini memiliki infrastruktur dasar yang lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah sekitar IKN.

"Wilayah sekitar IKN masih dalam tahap pengembangan, sehingga

belum layak huni bagi ASN. Misalnya, air bersih belum tersedia secara merata, begitu juga dengan jalan dan fasilitas lainnya," ujar Bagus, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim.

Bagus, yang merupakan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kaltim, juga menilai bahwa infrastruktur di IKN masih perlu ditingkatkan. Ia mengusulkan agar pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di ibu kota baru.

"Infrastruktur yang masih kurang harus segera diperbaiki secara bertahap, agar IKN bisa menjadi ibu kota yang modern dan nyaman," kata Bagus.

Bagus juga mengantisipasi adan-

ya perpindahan penduduk dan ASN dari Jakarta ke Kaltim dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa provinsi Kaltim harus siap menyambut mereka dengan menyediakan infrastruktur dan hunian yang memadai. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemindahan ibu kota.

"Perpindahan penduduk ke Kaltim pasti akan terjadi, oleh karena itu kita harus siapkan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Pemerintah daerah juga harus menunjukkan komitmen dan kerjasama dalam mendukung pengembangan IKN," tutup Bagus. **(Eky/Adv/DPRD Kaltim)**

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom

DAPATKAN GRATIS 1L OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Kode Promo BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang

Urusan Toyota lebih mudah!



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@ibishotelsamarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From **Rp 15.000** nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Keju



Teh Tatik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Kepala Dishub PPU, Andi Singkerru

Dishub PPU Siap Dukung Rencana Pembangunan Tol Laut

PPU - Dinas Perhubungan (Dishub) Penajam Paser Utara (PPU) siap mendukung rencana pembangunan tol laut. Meyakini terobosan ini untuk meningkatkan alur distribusi daerah dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adanya jalur tol laut ini dinilai bakal mempermudah akses keluar-masuknya barang dan logistik PPU. Sehingga dapat menekan harga komoditas, termasuk pangan yang dapat dijangkau masyarakat.

Kepala Dishub PPU, Andi Singkerru menyampaikan apresiasinya terhadap adanya rencana Pemkab PPU ini. Juga upaya yang telah dilakukan Pj Bupati PPU Makmur Marbun untuk menggagas dan merealisasikannya.

"Kami dari dishub PPU mengapresiasi sekali usulan ini, karena Pak Marbun bisa mengkoordinasikan secara langsung ke Pak Menhub,"

ucapnya, Rabu (1/11/2023).

Tol laut ini juga diharapkan membantu peningkatan perekonomian daerah. Utamanya menambah volume bongkar muat hasil pertanian dan perikanan PPU ke Balikpapan dan Samarinda.

Selama ini, barang logistik atau pangan yang masuk ke PPU berasal dari luar daerah seperti Surabaya dan Sulawesi. Kemudian diturunkan dulu di Balikpapan lalu dari Balikpapan akan tersebar di beberapa pelabuhan, untuk selanjutnya diangkut ke PPU.

Proses pengiriman barang dan pendistribusian inilah yang memicu harga barang yang masuk ke PPU menjadi lebih mahal. Karena ongkos distribusinya belum lagi waktu yang lebih lama sehingga mengakibatkan ketersediaan bahan pokok tidak bisa

dikendalikan.

"Sehingga rantai kebijakan untuk menentukan keputusan dapat secara langsung diputuskan oleh Pak Menteri," sebut Andi.

Ia meyakini rencana itu dapat direalisasikan. Utamanya karena Pj Bupati sangat memahami permasalahan dan penyelesaiannya. Ia berharap program ini dapat segera mendapatkan dukungan realisasi agar masyarakat PPU dan IKN dapat segera merasakan manfaatnya.

"Semoga terobosan yang dilakukan Pak Bupati dapat terus mendapat support dari seluruh SKPD terkait, sehingga langkah yang terus dilakukan Pak Bupati semakin mudah dalam rangka memajukan daerah kita tercinta ini, Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Serambi Nusantara," pungkasnya. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat berdiskusi dengan Menhub Budi Karya Sumadi di Balikpapan, Selasa (31/10/2023).

Bertemu Menhub, Rencana Pembangunan Tol Laut PPU Direspons Positif

PPU - Rencana pembangunan tol laut di Penajam Paser Utara (PPU) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin mulus. Gagasan itu bahkan sudah sampai ke Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dan merespons positif.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun melakukan pertemuan langsung dengan Budi Karya di Balikpapan, Selasa, (31/10/2023). Pertemuan dimaksud dalam rangka membahas percepatan pembangunan di PPU, khususnya terkait rencana pembangunan tol laut.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya banyak berdiskusi tentang beberapa aspek yang memang menjadi fokus di bidang infrastruktur.

Agar bisa terealisasi dalam waktu yang dekat. Makmur kemudian menyampaikan pentingnya pembangunan tol laut sebagai bagian dari upaya mendukung logistik non-material di Ibu Kota Nusantara (IKN). Serta pembangunan Bandara Udara VVIP IKN yang berada di wilayah PPU.

"Saya memohon ke Menhub agar rencana pembangunan tol laut dimaksud membantu mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat di PPU," ungkapnya. Pasalnya, Makmur menilai selama ini terbilang cukup mahal. Maka dari itu, terbangunnya tol laut juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar KIPP IKN.

"Sebab selama ini, rantai distribusi

kebutuhan pokok dengan jalur dari luar PPU masuk ke Pelabuhan Semayang Balikpapan lalu ke Pandan-sari, lalu ke satu pelabuhan lagi di Balikpapan, baru setelah itu masuk ke PPU. Hal itu membuat cost pengiriman menjadi tinggi," jelasnya.

Di lain pihak, Menhub Budi Karya secara prinsip setuju dengan usulan tersebut. Namun tempat pembongkaran tidak langsung ke Pelabuhan Buluminung, karena masih perlu peningkatan. "Saya setuju dengan menggunakan Kapal Roro, namun tetap di Pelabuhan Semayang. Akan tetapi distribusi bisa langsung, tidak lagi berpindah-pindah tempat," tutupnya. (ADV/SBK)

radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarbalikpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982



Di Hadapan Presiden Joko Widodo, Dirut PLN Paparkan Pengembangan Hydropower di Tanah Air

NUSA DUA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi booth PT PLN (Persero) dalam rangkaian World Hydropower Congress (WHC) 2023 di Nusa Dua Bali pada Selasa (31/10). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ Hydropower) di tanah air.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW," papar Darmawan.

Menurutnya, hal itu disebabkan tantangan berupa ketidakcocokan antara sumber energi baru terbarukan berskala besar, seperti air yang berada di daerah terpencil dan jauh dari episentrum kebutuhan listrik yang berada di wilayah lain.

Oleh karena itu, Darmawan mengatakan, PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan

strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.

"Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.

Selaras dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, pemanasan global adalah ancaman nyata bagi seluruh dunia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mempercepat transisi energi, melalui penambahan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam skala besar.

Menurutnya total potensi EBT di tanah air diperkirakan mencapai 3.600 Gigawatt (GW), baik dari matahari, angin, panas bumi, ombak, bio energi dan hydropower. Khusus untuk hydro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai potensial, di mana 128 di antaranya adalah sungai besar.

"Seperti sungai Mamberamo yang

memiliki potensi 24 ribu Megawatt (MW) di Papua. Kemudian Sungai Kayan di Kalimantan Utara memiliki potensi 13 ribu MW yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus," paparnya.

Namun, Presiden menekankan, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan untuk mengembangkan potensi besar hidro tersebut, salah satunya terkait lokasi sumber hidro yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Sehingga, pemerintah Indonesia membuat blue print percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower yang dibawa menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri.

Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi investasi dan alih teknologi. "Ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia," tambah Presiden. (ADV)



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

Pemaparan aplikasi online untuk PLKK di RSUD Taman Husada Bontang.

Sosialisasikan Aplikasi PLKK, RSUD Bontang Jalin Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

BONTANG - RSUD Taman Husada Kota Bontang sebagai RS pusat rujukan di Kota Bontang dan RS tipe B satu-satunya di Kota Bontang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait layanan kecelakaan kerja.

Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik, Puskesmas, balai pengobatan, praktik dokter bersama dan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

RSUD Bontang bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi aplikasi PLKK bertempat di Ru-

ang Rapat Nusa Indah, lantai 5 RSUD Bontang, Selasa (31/10/2023) guna memudahkan layanan apabila ada pasien dengan kasus kecelakaan kerja.

Bagian Hukum, Kehumasan dan Kerja Sama RSUD Bontang, Sofia Rachmawati menjelaskan kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan tata cara terkait PLKK bagi admin ruangan, admin IGD, tenaga klaim, tim administrasi, tim pendaftaran dan tim casemix RSUD Bontang. Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan alur PLKK.

"Diharapkan pelaksanaan kerja sama yang sudah berjalan selama ini dapat berjalan lebih baik lagi," ungkap Sofia kepada Mediakaltim.com.

Selanjutnya, Sofia mengatakan

pelayanan peserta PLKK di RSUD Bontang telah menggunakan sistem online. Tim BPJS Ketenagakerjaan memberikan beberapa petunjuk kepada tim RSUD agar memudahkan tim RSUD dalam pengisian sistem dan meminimalisir kesalahan dalam proses penagihan.

"Untuk bulan Desember BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan sosialisasi kembali khusus untuk tenaga klaim dalam penggunaan sistem online. Sehingga pada bulan Januari 2024 diharapkan tim RSUD Bontang dapat menggunakan aplikasi BPJS ketenagakerjaan secara maksimal," terangnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Jangan Abaikan, Kenali Gejala DBD dan Cara Mencegahnya

BONTANG - Gejala Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Bontang khususnya semakin meningkat, bahkan bisa dikatakan untuk DBD ini tidak tergantung dengan musim, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk saat ini pun DBD banyak menyerang pada anak-anak remaja kebanyakan.

Dokter Spesialis Anak RSUD Bontang, dr. Ida Ayu Laksmi Arnita Utari, M.Sc,Sp.A mengatakan bahwa sebaiknya menghindari tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk kebanyakan. Yakni, seperti genangan air sehabis hujan atau bahkan pot-pot bunga juga menjadi salah satu sarangnya jentik-jentik dan bahkan menjadi nyamuk.

"Ini sebenarnya sangat bisa dicegah, seperti membersihkan penampungan air, atau bak kamar mandi. Kita harus rajin sikat dan dibersihkan," ucapnya saat diwawancarai awak media radarbontang.com, Rabu (1/11/2023).

Tanda BDB pun antara lainnya seperti demam tinggi, 2-7 hari harus sangat diwaspadai. Karena jika demam tinggi dan sudah melebihi dari 3 hari lamanya, maka diharuskan untuk periksa dan dibawa ke Laboratorium. Selain demam ada juga sakit kepala, mata terasa nyeri, nyeri sendi, serta bintik merah.

"Paling utamanya adalah demam, saran saya dihari ketiga dan keempat jika demam tidak turun, maka segera periksa dan cek di Lab. Tetap juga harus mengukur demam menggunakan termometer setiap saat," paparnya.

Maka dari itu, dr Laksmi sangat mengimbau agar masyarakat dapat melakukan pencegahan dengan 5M. Pertama, menguras. Masyarakat dapat menguras, membersihkan tempat penyimpanan atau genangan air.

Kedua, menutup. Tutuplah kembali tempat air rapat-rapat setelah mengambil airnya, agar jentik atau nyamuk tidak dapat masuk.

Ketiga, mengganti air yang berada di vas bunga atau pot tanaman air. Keempat, mengubur dan buanglah plastik dan barang bekas pada tempatnya, agar sampah tidak digenangi oleh air saat hujan. Dan kelima menaburkan bubuk abate di tempat-tempat air yang sulit sekiranya untuk dikuras. Hal ini akan membunuh jentik-jentik nyamuk. (dwi/adv)

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



dr. Ida Ayu Laksmi Arnita Utari, M.Sc,Sp.A saat diwawancarai awak media.

Makin Lengkap, Kini RSUD Bontang Sudah Memiliki CT Scan

BONTANG - Saat ini RSUD Taman Husada Bontang sebagai salah satu Rumah Sakit (RS) Tipe B, di mana RSUD tersebut sangat berupaya untuk memenuhi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasiennya. Salah satunya ialah dengan cara melengkapi alat medis. Pada saat ini, RSUD Bontang telah memiliki CT Scan.

Computer Tomography (CT) Scan merupakan alat diagnostik radiologi yang menggunakan komputer untuk melakukan rekonstruksi data dari daya serap suatu jaringan atau organ tubuh tertentu yang telah ditembus oleh sinar X, sehingga terbentuk sebuah gambar. Gambar yang didapat menunjukkan detail dari organ, tulang, dan jaringan lain.

Tri Ratna Paramita, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik menjelaskan bahwa CT Scan ini lebih maju lagi, karena bisa juga mendiagnosa cedera pada organ dalam. CT Scan juga berguna untuk memastikan lokasi infeksi dan pembekuan darah. Menunjang penegakan diagnosis kelainan tulang, sendi, serta otot.

"Ini adalah prosedur pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi komputer khusus, dan sinar-X untuk melihat jaringan dan struktur yang ada di dalam tubuh melalui berbagai sudut," ucapnya.

Untuk alat medis CT Scan ini, hanya ada beberapa RS Bontang saja yang memiliki, salah satunya yakni di RSUD Taman Husada. Di mana

RSUD berusaha untuk membenahi dan berupaya melengkapi kekurangan sarana dan prasarana termasuk alat medis.

"Untuk saat ini, RSUD Bontang sudah memiliki beberapa alat medis, antar lainnya adalah CT Scan," ucapnya.

Dalam hal ini, Ratna menambahkan untuk dapat membeli alat medis sebenarnya sangat mudah, akan tetapi yang menjadi kendala adalah untuk perizinan alat tersebut, RSUD harus melengkapi alat pendukung yang akan digunakan untuk sekitar ruangan. (dwi/adv)

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

Penggunaan alat operasi laparoskopik oleh dokter.

Mengenal Layanan Operasi Laparoskopik Milik RSUD Taman Husada Bontang

BONTANG – RSUD Taman Husada Kota Bontang telah memiliki layanan operasi menggunakan laparoskopik. Alat laparoskopik milik RSUD telah ada sejak tahun 2017.

Dokter spesialis bedah RSUD Taman Husada Bontang, dr Muhammad Hidayat, Sp.B memperkenalkan operasi laparoskopik, yang merupakan tindakan operasi menggunakan alat dengan meminimalkan irisan pada operasi dengan irisan sebesar 0,5-1,5 cm. Kemudian memasukkan alat seperti kamera untuk melihat bagian dari dalam organ tubuh.

“Operasi ini merupakan operasi invasif yang dimaksudkan alat untuk rongga-rongga kecil bagian tubuh pasien,” katanya.

Selanjutnya, dr Hidayat menga-

takan alat laparoskopik sendiri telah ada sejak tahun 2017 lebih kurang 6 tahun lalu telah ada di RSUD Bontang. “Sudah sejak ada di tahun 2017 dan telah digunakan hingga saat ini,” ungkapnya.

Ia menyebutkan manfaat layanan laparoskopik bagi operasi-operasi rongga-rongga kecil di bagian tubuh seperti perut. Selain lama rawat inap dapat dipersingkat yang biasanya 5-7 hari dapat menjadi hanya satu hari dengan menggunakan alat laparoskopik.

“Manfaatnya meminimalkan rasa sakit karena irisan operasi yang sangat kecil. Keunggulan operasi ini dengan sedikit mengembangkan perut, maka ruang operasi terlihat luas dan lebih jelas. Dengan begitu akan

meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat operasi seperti pada saat operasi open (terbuka),” jelasnya.

Selain itu, Ia mengatakan layanan alat laparoskopik tetap dapat melayani pasien umum BPJS Kesehatan kelas 1,2 dan 3 dan pasien umum lainnya. Pasien BPJS Kesehatan dapat menggunakan layanan ini tanpa ada pengeluaran biaya apa pun.

“Masyarakat saat ini tidak perlu khawatir untuk melakukan operasi dengan alat laparoskopik. Bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya pengeluaran apa pun dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan,” pungkasnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Biggen Karama No. 116A, Belimbing Sari, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

TOYOTA LET'S GO BEYOND

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

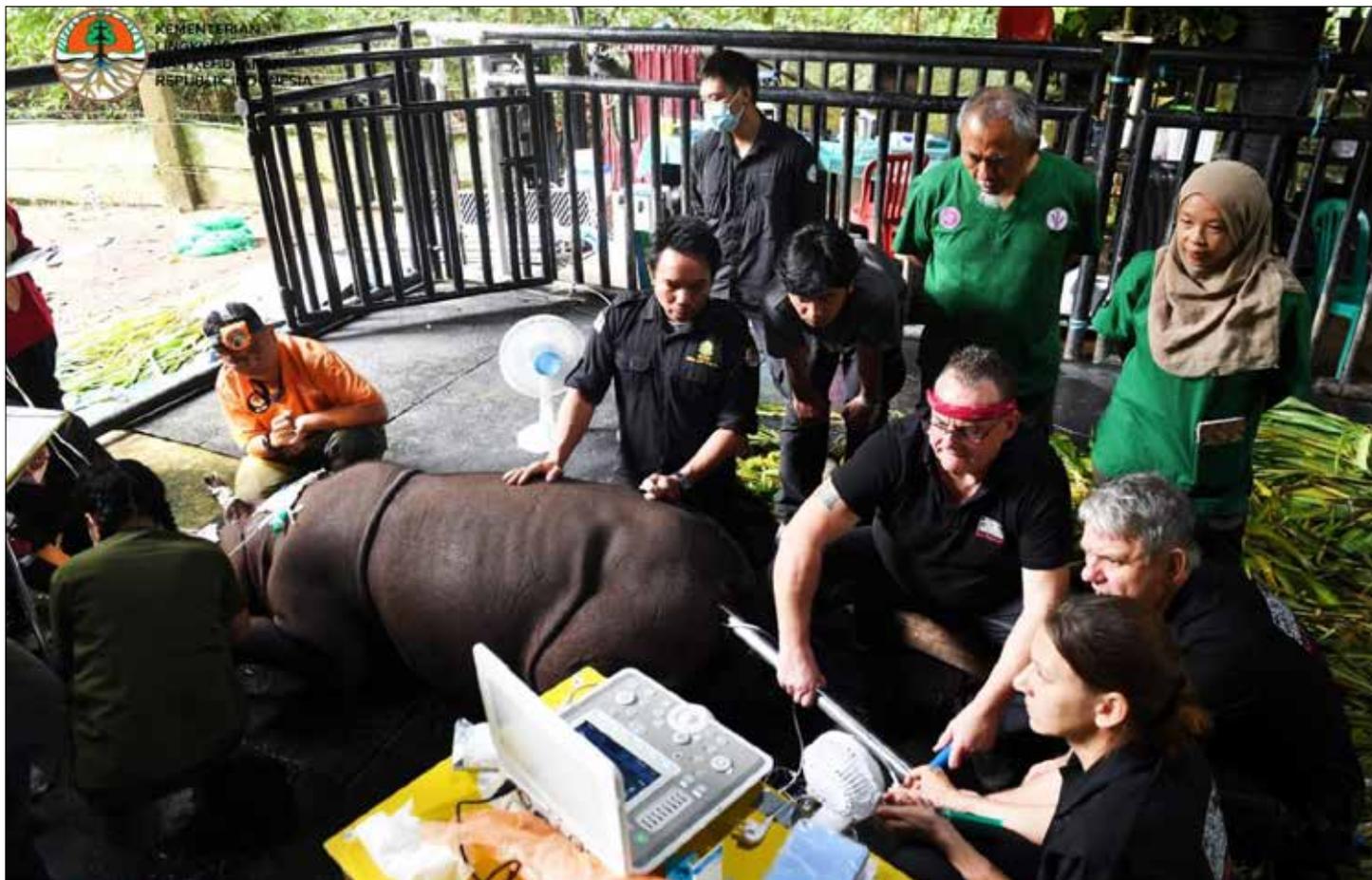
GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!

Bontang



Proses pengambilan sel telur dari salah satu badak betina di Kalimantan Timur, bernama Pahu.

BKSDA Kaltim dan IPB Lakukan Pengembangbiakan Badak Sumatra di Kaltim

BALIKPAPAN - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur dan tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB University) bekerja sama untuk melakukan upaya pengembangbiakan buatan badak Sumatra di Kalimantan. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan kelestarian badak Sumatra yang hanya tersisa dua ekor di Kalimantan.

Dalam pelaksanaannya Tim dari IPB University melakukan pengambilan sel telur dari salah satu badak betina Kalimantan, bernama Pahu. Sel telur tersebut kemudian dibawa ke laboratorium IPB University di Bogor untuk diproses lebih lanjut.

"Upaya pengambilan sel telur badak Pahu dilakukan untuk mempertahankan kelestarian Badak Sumatra yang berada di Kalimantan khususnya Kalimantan Timur," ujar Kepala BKSDA Kalimantan Timur, Ari Wibawanto, Selasa (31/10/2023).

"Kita mengejar waktu karena dalam kurun waktu 20 jam sel telur (oozit) Badak Pahu harus dapat diterima di Laboratorium IPB University Bogor dari santuary badak kami di Kelian Kutai Barat," tambahnya.

Lebih lanjut Ari menjelaskan, Pahu merupakan badak Kalimantan (*Dicerorhinus sumatrensis*) berjenis kelamin betina yang telah berhasil dipindahkan dari habitatnya ke Suaka Badak Kelian (SBK) di Hutan Lindung Kelian PT Hutan Lindung Kelian Lestari pada tahun 2018.

Proses pengembangbiakan buatan badak, sepenuhnya dilakukan oleh Tim ART Badak IPB University dengan asistensi KLHK.

"Selain pengambilan sel telur Badak Pahu kami pun mengambil sampel-sampel genetik lainnya dari Pahu, seperti sel kulit dan darah, yang akan kita analisis di laboratorium kami di bogor," jelasnya.

Proses pembuatan embrio badak, Pahu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada prosesnya akan dititipkan embrio tersebut ke rahim salah satu badak betina yang berada di Sumatera sebagai induk titip atau induk pengganti (surrogate mother). Indonesia merupakan rumah bagi dua badak paling langka di dunia, badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*).

"Keberadaannya hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon dan badak sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*) yang secara terisolir mendiami Kawasan Ekosistem Leuser - Aceh, TN Way Kambas dan satu Kawasan hutan di wilayah kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur," tutup Ari.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

Hore! Gaji Honorer di Bontang Resmi Naik

BONTANG - Gaji tenaga honorer di Bontang resmi dinyatakan naik pada Oktober 2023. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sonny Suwito saat dihubungi Rabu (1/11/2023). "Gaji mereka naik Oktober ini, tapi dibayar di November ini untuk kenaikannya" jelasnya

Gaji honorer di Bontang disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang berkisar Rp 3,4 juta. Kenaikan gaji itu sudah berdasarkan usulan

menggunakan APBD Perubahan 2023.

Gaji honorer kali ini akan berbeda untuk yang bekerja di wilayah Bontang Lestari dan yang kerja di dalam kota. Honorer yang bekerja di Bontang Lestari akan mendapat tambahan biaya transportasi. "Uang transportasi yang akan diberikan sekitar Rp 250 ribu per bulannya," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati menjelaskan bahwa kenaikan gaji honorer ini juga akan dirasakan oleh

tenaga pengajar.

Berikut rincian gaji honorer di Bontang Lestari yakni Pegawai Honorer Setara SD/SMP sekitar Rp 3.670.000, SMA/D2 Rp 3.720.000, D3 Rp 3.770.000, D4/S1/S2 Rp 3.870.000.

Rincian Gaji Honorer di dalam Kota untuk SD/SMP Rp 3.420.000, SMA/D2 Rp 3.470.000, D3 Rp 3.520.000, D4/S1/S2 Rp 3.620.000.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari

Ketua DPW Minta Seluruh Caleg Partai Perindo Patuhi Strategi DPP

BONTANG - Seluruh kader dan calon anggota legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang akan bersaing untuk kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPW), maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bontang, diminta untuk mematuhi seluruh strategi yang telah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada Rabu (01/11/2023).

Hendrik Jumaidi, Ketua DPD Kota Bontang Partai Perindo, mengatakan, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I ini digelar dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, sehingga siap untuk berjuang menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah, agar tetap solid. "Anggota DPD, DPW, hingga DPR RI, dari Partai Perindo, harus bersatu dan solid," tegas Hendrik.

Selain itu, kata Hendrik, mereka juga diberikan pembekalan tentang cara memperoleh dukungan sebanyak mungkin dengan cara yang benar, bukan melalui tindakan yang tidak benar. "Kami ingin semua anggota partai Perindo solid, sehingga kami dapat menggalang dukungan suara yang signifikan. Tujuan kami adalah agar Partai Perindo memiliki perwakilan di DPRD Bontang, Provinsi, bahkan di DPR RI," ungkapnya.

Hendrik menjelaskan bahwa salah satu moto Partai Perindo adalah untuk mencapai dua digit dalam jumlah perwakilannya. Misalnya, jika ada 25 anggota dewan di Kota Bontang, mereka ingin memiliki 3 anggota dewan, yang setara dengan lebih dari 10 persen dari total kursi. "Kami menargetkan dapat 4 kursi di Bontang Selatan, 2 kursi di Bontang Utara, dan meskipun tidak ada kursi di Bontang Barat karena persaingannya sangat ketat, kami berusaha agar perwakilan Partai Perindo bertambah 2 di Selatan dan 1 di Utara, total 3 kursi untuk target Partai Perindo Bontang," paparnya.

Kedepannya, mereka berharap jika terpilih, mereka akan berjuang dengan segenap kemampuan untuk masyarakat. Mereka menganggap ini sebagai tanggung jawab sosial mereka, setelah sebelumnya fokus pada keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka mengajak masyarakat untuk memilih mereka sebagai perwakilan yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam acara yang sama, Hamdani, Ketua DPW Kaltim Partai Perindo, menyatakan bahwa Rakerda ini diadakan untuk memperkuat organisasi yang masih baru. Ia menekankan pentingnya anggota pengurus Partai Perindo mengikuti arahan dari pimpinan pusat, karena mereka telah mengatur strategi yang harus diikuti. "Kita harus tunduk pada arahan pemimpin, dan dalam acara ini, bukan hanya pemateri yang berbicara, tapi juga teman-teman yang hadir untuk memberikan masukan dan pendapat," ucapnya.

Hamdani juga berharap bahwa dengan naiknya dukungan secara bertahap, semua tujuan yang belum tercapai akan segera terwujud, dan yang paling penting adalah jika terpilih menjadi anggota DPRD, mereka tidak akan melupakan partai yang telah mendukung mereka dan para rekan-rekannya.

Penulis: Dwi S

Editor: Agus S



DWI/RADAR BONTANG

Hendrik Junaidi (kiri), Ketua DPD Partai Perindo Bontang, dan Hamdani (kanan), Ketua DPW Provinsi Kaltim, dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I yang berlangsung di Hotel Akbar.



Wow, Peserta Expo Dahau Sendawar Raup Keuntungan hingga Puluhan Juta Rupiah

KUTAI BARAT - Para penjual souvenir dan kerajinan tradisional di Kabupaten Kutai Barat meraih untung hingga puluhan juta rupiah dalam pameran pembangunan selama Expo Dahau Sendawar 2023. Salah satunya diakui Hellen, penjual kerajinan asal kecamatan Damai.

"Lumayan lah selama pameran ini kita dapat itu sekitar 30 juta lebih," kata Hellen yang berjualan di Stan pameran UMKM yang berpusat di Taman Budaya Sendawar Senin (1/11).

Dia mengaku souvenir yang paling diburu adalah 'anjat' atau tas tradisional suku Dayak yang terbuat dari rotan. Lantaran akan ada pemecahan rekor MURI pengguna

anjat terbanyak pada 5 November mendatang.

"Paling banyak orang tanya anjat, terus topi rotan, gelang dan baju. Mungkin mereka pakai pas pemecahan rekor itu makanya banyak ini yang cari," ujar Hellen.

Karena tingginya permintaan, Elen dan sejumlah penjual menaikkan harga juga hingga 300 persen. "Kaya anjat itu tadinya kan kecil hanya dijual Rp 75 ribu sekarang dijual Rp 300 ribu tetap ada yang beli. Jadi senanglah," ucapnya ceria.

Panitia Dahau Sendawar memang mengadakan pemecahan rekor MURI pengguna anjat terbanyak pada 5 November 2023 atau puncak

peringatan HUT ke-24 Kubar. Sehingga secara langsung memberi keuntungan kepada para pengrajin yang berjualan di pameran.

"Harapan kita dengan pameran ini bisa meningkatkan perputaran ekonomi para pelaku UMKM, pengrajin dan masyarakat Kutai Barat pada umumnya," ujar Ketua Panitia Dahau, Nopandel.

Adapun pameran ini digelar selama dua pekan mulai 23 Oktober - 5 November 2023.

Penulis : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari



Lomba Balap Ketinting Tak Sekadar Olah Raga, Berpotensi Tarik Wisatawan

KUTAI BARAT - Panitia Festival Dahau Sendawar dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Kutai Barat ke-24 kembali menyelenggarakan lomba Perahu Naga dan Balap Ketinting. Lomba yang berpusat di Sungai Mahakam, Kecamatan Melak itu akan dibagi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan.

Untuk kategori perempuan, dipastikan akan diikuti kembali oleh joki perempuan dari sejumlah daerah. Diyakini gaya balap mereka akan mampu menarik perhatian.

"Kalau balap ketinting perempuan diikuti 30 peserta kelas 7,5 PK dan jarak lintasan 2 Km. Antusias peserta

juga sangat luar biasa. Kita harapkan mereka jadi daya tarik dalam lomba ini," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, Yuyun Diah Setiorini yang juga panitia Lomba Balap Ketinting, Selasa (31/10/2023).

Lomba Balap Ketinting dan Perahu Naga rencananya akan digelar selama 4 hari. Adapun peserta tidak hanya dari Kutai Barat tetapi berasal dari luar daerah. "Ada dari Samarinda, Bontang dan Kutai Kartanegara. Memang mayoritas dari Kutai Barat," ujarnya.

Menurut Yuyun, lomba ini tidak sekedar olahraga tetapi ada tontonan menarik yang bisa mendatangkan

wisatawan. "Makanya kita akan gelar rutin setiap tahun. Termasuk dalam Festival Gemeoh Melayu di Kecamatan Melak juga kita adakah lomba di Mahakam," ucapnya.

Sementara salah satu peserta mengaku antusias bisa ikut lomba balap perahu tersebut. "Senang saja bisa ikut lomba karena memang hari-hari kita kan cari ikan di sungai jadi udah biasa ketinting," ungkap Rita salah satu peserta asal Kecamatan Melak.

Pewarta : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari



Raih Juara Umum, Sanggar Seni Seroyoq Linggang Bigung Dapat Hadiah Rp 5 Juta

KUTAI BARAT - Para penari dari Sanggar Seni Seroyoq Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung menjadi Juara Umum lomba tari kreasi atau modern dalam rangkaian Festival Dahau Sendawar 2023. Sanggar Sebi Seroyoq memborong Juara I dan Juara II untuk kategori Tari Kreasi Pelajar. Sedangkan Juara III diraih SMK Negeri 1 Sendawar.

"Selamat kepada Seroyoq Karang Songan dan Seroyoq Perkasa atas prestasinya menjuarai lomba tari

kreasi daerah pelajar tahun 2023 ini," terang Seki selaku Tim Juri saat mengumumkan pemenang di Taman Budaya Sendawar, Senin (29/10/2023).

Seki mengatakan, para peserta menampilkan tarian daerah dengan kreasi yang menarik. Sehingga lomba ini dinilai sangat kompetitif.

"Semua peserta sudah menampilkan yang terbaik dan sangat kompetitif. Jadi para juara ini memang yang terbaik," katanya.

Adapun Sanggar Seni Seroyoq

juga menjadi Juara III lomba tari pedalaman yang membuat mereka jadi juara umum lomba tari-tarian yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-24 Kabupaten Kutai Barat.

Masing-masing juara mendapat hadiah uang tunai Rp 5 juta untuk Juara I, Rp 4 juta untuk Juara II dan Rp 3 juta untuk Juara III.

Penulis : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari



Pengecekan kendaraan roda dua sebelum diserahkan ke PPL

Pemkab Paser Inventaris 92 Unit Kendaraan Tunjang Kinerja PPL

PASER - Sebanyak 92 unit kendaraan roda dua disalurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) guna menunjang kinerja di lapangan dalam melaksanakan tugas pendampingan ke para petani.

Puluhan kendaraan itu diserahkan Bupati Paser, Fahmi Fadli didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Paser Paser, Erwan Wahyudi, di Kantor DTPH Kabupaten Paser, Rabu (1/11/2023).

"Sebagai bentuk perhatian Pemkab kepada PPL, selama ini telah berupaya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani di Kabupaten Paser," ucap Fahmi.

Dijelaskan Fahmi, pertanian merupakan program andalan dan mempersiapkan daerah dalam ketahanan pangan serta penyediaan pangan di Kabupaten Paser dan Ibu Kota Neg-

ara (IKN) Nusantara ke depannya.

"Layaknya Kabupaten penyangga IKN, perlu dilakukan persiapan sejak dini dan tidak hanya bagi elemen Pemerintah saja, tapi juga penting bagi elemen masyarakat," jelasnya.

Dikonfirmasi jumlah PPL yang hanya 102 orang sedangkan luas area lahan pertanian mencapai 9.000 hektare di Paser, Fahmi tak bisa memberikan komentar banyak. Sebab tidak ada lagi penambahan jumlah PPL.

"Kalau memang perlu ditambah, kita hanya perlu mengusulkan ke kementerian. Pertanyaannya, apakah disetujui atau tidak?," tandasnya.

Erwan Wahyudi menjelaskan kendaraan ini bersumber dari APBD 2023 kabupaten Paser. Ada dua tahap penyalurannya, yakni melalui APBD murni dan APBD perubahan dengan total 102 unit kendaraan dengan anggaran Rp 3 miliar bagi semua PPL.

"Tidak pilih-pilih, mau honorer

maupun PNS semuanya diberikan," tandasnya.

Ia mengaku jenis kendaraan adalah trail dan akan diberikan kepada penyuluh yang bertugas di area yang kondisinya sulit terjangkau. "Memang sebelumnya ada beberapa motor matic dan bebek," sambung dia.

Menyikapi jumlah PPL yang hanya 102 orang, dengan area lahan pertanian di atas 9.000 hektar. Dijelaskannya akan memanfaatkan jumlah tenaga yang ada. Dia berharap ke depannya ada kebijakan khusus.

"Memang kita terasa sekali sangat kurang jumlah PPL. Sebagai pendongkrak agar kinerja semakin maksimal maka disiapkan lah unit kendaraan dinas bagi para pegawai," pungkasnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Suasana pembukaan Berau EXPO 2023.

Berau EXPO 2023 Resmi Dibuka, Harap jadi Titik Pulih UMKM dan Perekonomian

TANJUNG REDEB - Pagelaran Berau EXPO 2023 yang merupakan rangkaian hari jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb telah dibuka secara resmi oleh Bupati Sri Juniarsih, Rabu (1/11/2023).

Di sela pembukaan, Sri Juniarsih menekan tombol sirine sebagai simbol telah dibukanya pameran dagang tersebut. Selain itu juga menerbangkan balon ke udara.

Ia mengungkapkan, tema yang diusung dalam Berau Expo 2023 adalah Ekonomi Bangkit, Berau Kuat, Masyarakat Sejahtera. "Tema itu kita pilih karena saat ini merupakan titik pulih perekonomian pasca pandemi," ungkapnya.

Dijelaskan Sri Juniarsih, Berau Expo diselenggarakan setiap dua tahun sekali, yang dikemas dengan capaian program-program unggul serta pembangunan yang telah terealisasi.

"Baik pencapaian pembangunan yang berhasil dicapai oleh Pemkab Berau. Termasuk juga capaian pihak swasta, maupun oleh masyarakat di tingkat kecamatan," katanya.

Nakhoda perempuan pertama di Bumi Batiwakkal ini membeberkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut ikut serta dalam expo tersebut harus menampilkan progres program kerja.

"Supaya diketahui masyarakat secara luas, bagaimana program kerja

yang selama ini telah dilakukan. Baik itu yang sudah selesai maupun masih dalam tahap pengerjaan," jelasnya.

Sri berharap, dengan adanya Berau Expo ini, dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat Berau yang ingin tahu lebih banyak mengenai perkembangan daerahnya.

Selain itu, masyarakat juga bisa melihat kemajuan Kabupaten Berau yang telah diraih oleh Pemkab Berau bersama pemangku kepentingan lainnya.

"Sengaja kami turut sertakan 13 kecamatan, untuk menampilkan 100 kampung yang ada di Bumi Batiwakkal. Sehingga, masyarakat juga dapat melihat kinerja Pemerintah Daerah lebih dekat," ujarnya.

Kendati demikian, kegiatan Berau Expo juga menjadi ajang hiburan bagi masyarakat Berau. Dengan menampilkan beberapa bintang tamu ibukota, selama 10 hari kedepan.

"Event terlaksana murni dari anggaran APBD Berau. Saya harap masyarakat Berau dapat menikmati Berau Expo ini," tuturnya.

Sementara, Eksekutif Produser CV Vocus Production atau EO Berau EXPO 2023, Morten menuturkan, semua persiapan sudah dilakukan, dan diyakininya pelaksanaan Berau Expo 2023 akan berjalan lancar dan maksimal.

Dirinya menyampaikan, pelaku UMKM atau para pedagang sangat

antusias. Hal itu dibuktikan lewat semua stand yang disiapkan sebanyak 120 telah terisi. "Kami ingin lewat Berau Expo 2023 ini, UMKM lokal bangkit," imbuhnya.

Morten menjelaskan, jika masyarakat ingin berkunjung ke expo, yang menggunakan kendaraan umum, ada beberapa jalur umum yang dialihkan dari Jalan Pemuda nanti diputar di depan Dinas Sosial (Dinsos).

Kemudian, dari arah Jalan Pemuda depan PT Berau Coal mengarah ke lokasi acara menggunakan jalur satu arah. Adapun untuk parkir bisa menggunakan bahu jalan. Namun satu sisi dan itu tidak dipungut biaya.

"Kalau ada pihak yang memungut biaya parkir, silahkab berkoordinasi dengan Bapenda Berau terkait mekanismenya. Nanti juga, untuk rekayasa lalu lintas, akan ditangani oleh Dishub dan aparat kepolisian. Jalur mana saja yang dibuka dan ditutup," bebernya.

Untuk masalah listrik saat kegiatan, Morten memastikan aman. Karena diakuinya, pihaknya telah menyiapkan genset untuk even tersebut.

"PLN ini yang akan membackup kebutuhannya. Kenapa kami minta PLN, karena kita tidak tahu misalnya kurang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lain-lain kita alihkan ke PLN, seperti itu," tandasnya. **(dez)**



MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy
THAT'S ALL.COM



**DINKES KALTIM TERUS
TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN DI BENUA ETAM**



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



Dra. Sri Wahyuni M,PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PG GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr Jaya Muallimin

DINKES KALTIM TERUS TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI BENUA ETAM

SAMARINDA- Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr Jaya Muallimin berharap acara "Membangun Tradisi Luhur Profesi Dokter Indonesia" yang digelar oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Universitas Mulawarman pada beberapa waktu lalu, dapat mendorong para dokter di Kaltim untuk meningkatkan kompetensi, integrasi, dan profesionalisme guna berikan pelayanan bermutu kepada masyarakat.

Jaya juga mengapresiasi program IDI Kaltim sebagai bentuk pengabdian para dokter kepada bangsa dan negara.

Salah satu misi yang menjadi prioritas, menurut Jaya adalah "Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas".

"Guna mencapai misi, tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan adalah meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat yang diukur dengan usia harapan hidup," jelas Dr Jaya Muallimin, Senin (30/10/2023).

"Target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yakni usia harapan hidup masyarakat pada 2020 sudah mencapai 74,33 tahun, dari target yang ditetapkan yaitu 73,76 tahun.

"Pencapaian itu menunjukkan upaya kami untuk tingkatkan kesehatan dan gizi masyarakat telah membuahkan hasil yang positif," bebernya.

Akan tetapi, Dinkes Kaltim tidak akan berhenti di situ dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, ke-farmasi-an, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.

"Dinkes Kaltim juga melaksanakan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan Provinsi Kalimantan Timur terkait bidang kesehatan," pungkasnya. **(ADV/nta)**

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni MPP
SEKDA PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
PG GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr Jaya Muallimin

DINKES KALTIM MINTA WARGA WASPADA VIRUS TBC

SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim), Dr Jaya ajak warga agar selalu waspada terhadap penyebaran penyakit tuberkulosis (TBC).

Hal ini dikatakannya perlu diwaspadai, sebab TBC mampu menyerang organ paru-paru. Bahkan tak jarang pengidap TBC hingga meninggal dunia.

"Tidak cuma itu, terkadang juga hingga menyerang organ lainnya," ucap Dr Jaya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Ia meminta kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Jika menemukan gejala TBC harus segera ditangani. Sebab jika dibiarkan TBC dapat menular.

"Akibatnya biasanya pengidap batuk-ba-

tuk, karena organ pertama yang diserang paru-paru. Batuknya biasanya kering atau berdahak. Ini harus didiagnosa biasanya dalam kurun waktu dua minggu," ungkapnya.

Orang yang mengidap TBC dan tidak diperiksa bisa jadi penyebab awal penularan kepada keluarganya.

Sebab keluarga adalah lingkungan terdekatnya dan paling banyak berkontak dengan pengidap.

"Jadi jika menemukan gejala TBC terhadap keluarga harus segera diperiksa. Jika dalam dua minggu batuk tak berhenti maka harus segera diperiksa," pungkasnya. (adv)

Pewarta : Viqih Jati Kusum
Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PG GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, MKes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr Jaya Muallimin

TEKAN KASUS DBD, DINKES KALTIM GUNAKAN TEKNOLOGI BAKTERI WOLBACHIA

SAMARINDA - Dalam upaya menekan angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Bontang akan menjadi pilot program Teknologi Wolbachia. Kota Bontang dipilih lantaran memiliki jumlah kasus DBD tertinggi di Kaltim.

Teknologi Wolbachia sendiri merupakan bakteri alami, simbiosis yang umum ditemukan di hewan arthropoda, dengan mekanisme menghambat replikasi virus dengue yang diperankan oleh Wolbachia.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, Dr Jaya Muallimin mengatakan, pilot program Wolbachia ini direncanakan akan diadakan di Kota Bontang pada bulan September 2023 mendatang.

"Ini arahan langsung dari Kemenkes. Penerapan pilot program pertama nanti akan dilakukan di Kota Bontang pada September nanti," ucap Dr Jaya saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu.

Dr Jaya mengungkapkan, pilot program ini merupakan pertama kali dilakukan. Tujuannya sendiri guna meminimalisir penyebaran kasus DBD. Katanya hal ini mampu menekan angka kasus DBD di Kaltim hingga 77 persen.

"Hasil penelitian tersebut mampu menurunkan 77 persen incidence rate (IR) Dengue dan mengurangi masuk RS sebesar 86 persen," jelas Dr Jaya.

Sementara itu, untuk kinerja Wolbachia sendiri, Dr

Jaya menyebutkan nyamuk ber-Wolbachia yang dilepas ini nantinya akan kawin silang dengan nyamuk *Aedes Aegypti* pembawa DBD.

"Setelah kawin silang ini, akan menghasilkan keturunan nyamuk ber-Wolbachia," ungkapnya. "Wolbachia sendiri sudah terbukti ampuh dan telah digunakan di berbagai negara maju untuk menekan angka DBD," lanjutnya.

Untuk mensukseskan pilot program Wolbachia ini, kata Dr Jaya juga diperlukan komitmen kepala daerah dengan seluruh lintas sektor, dan lintas program terkait. **(adv)**

Pewarta : Viqih Jati Kusuma
Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni MPP
SEKDA PROV. KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
PG GUBERNUR KALTIMdr. H. Jaya Muallim, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltim, Dr Ivan Hariyadi

DINKES KALTIM: AYO IMUNISASIKAN ANAK

SAMARINDA - Ajakan agar orang tua lebih memperhatikan serta menjaga kesehatan anak disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim). Imunisasi, salah satu cara agar kesehatan anak dapat terjaga.

Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltim, Dr Ivan Hariyadi mengatakan imunisasi dapat dilakukan semasa anak masih bayi hingga sudah Sekolah Dasar (SD).

Hal ini dinilai sangat penting, sebab jika anak tak mendapat imunisasi maka daya tahan tubuhnya akan lemah. Sehingga akibatnya anak akan lebih mudah sakit.

"Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan imunisasi ini untuk menjaga kesehatan anak-anak mereka," ucap Dr Ivan saat dikonfirmasi Kamis (7/9/2023).

Kata Dr Ivan, saat ini masih saja ada orang tua yang belum melakukan imunisasi

terhadap anak mereka dengan berbagai alasan. Padahal, imunisasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah anak-anak menderita penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin.

"Ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mencegah anak-anak menderita penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Saat ini tingkat cakupan imunisasi di Kaltim sudah cukup bagus. Kami juga telah memperkenalkan imunisasi-imunisasi baru seperti rotavirus, PCV dan HPV," ungkapnya.

Diharapkan para orang tua dapat melakukan Imunisasi kepada anak mereka, karena imunisasi merupakan langkah pencegahan yang paling efektif.

"Imunisasi ini merupakan program pemerintah, sayang kalau tidak dimanfaatkan masyarakat," pungkasnya. **(adv/vic)**



Dr Jaya Muallimin saat memimpin rapat Rancangan Pergub Penanggulangan TBC.

TEKAN ANGKA PENDERITA TBC, DINKES KALTIM GELAR RAPAT BAHAS RANCANGAN PERGUB

SAMARINDA - Guna menanggulangi penyakit Tuberkulosis (TBC), Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) menggelar rapat membahas rancangan peraturan Gubernur (Pergub) terkait penanggulangan TBC. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (7/9/2023).

Rapat ini digelar sebab TBC masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kaltim.

Kepala Dinkes Kaltim, Dr Jaya Muallimin mengatakan bahwa berdasarkan laporan Global TB tahun 2022, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam hal jumlah kasus TBC tertinggi, setelah India. Pemerintah telah menegaskan komitmennya terhadap eliminasi TBC melalui "Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC tahun 2030" dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 mengenai Penanggulangan Tuberkulosis.

Kata Dr Jaya, Rancangan Pergub

yang saat ini tengah disusun pihaknya ini bertujuan untuk mempercepat eliminasi Tuberkulosis di Kaltim sesuai dengan target nasional yakni pada tahun 2030.

"Kita harapkan dengan disusunnya pergub penanggulangan tuberkulosis ini agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga kasus Tuberkulosis bisa ditangani dan teratasi bahkan lebih cepat dari target nasional yaitu pada tahun 2030," ucap dr Jaya saat diwawancarai usai rapat.

Ia menyebutkan, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 5.010 kasus TBC di Kaltim. Akan tetapi, data per Oktober 2022 menunjukkan bahwa kasus TBC di Kaltim masih rendah, yaitu hanya mencapai 74% dari tahun sebelumnya.

Upaya mempercepat eliminasi Tuberkulosis di Kaltim pada tahun 2030 merujuk pada beberapa indikator diantaranya penurunan angka kejadian (incident rate) TBS menjadi 65/100.000 penduduk dan penurunan angka

kematian akibat TBC menjadi 6/100.000 penduduk.

"Pada tahun 2022, tercatat 42 kasus TBC RO, yang kemudian meningkat menjadi 62 kasus. Tingkat keberhasilan pengobatan TBC pada tahun 2022 masih rendah, yaitu sebesar 44 persen," ungkapnya.

Untuk menekan angka penderita TBC di Kaltim, Directly Observed Treatment Strategy (DOTS) menjadi strategi dalam penanggulangan Tuberkulosis yang terdiri dari 5 strategi. Yaitu komitmen dalam mendukung pengobatan TBC sampai tuntas, pendiagnosaan TBC melalui pemeriksaan bakteriologis, pendampingan Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk menjamin kesembuhan, dan penyediaan obat TBC yang terjamin baik kualitas maupun kuantitas, serta pencatatan dan pelaporan kasus TBC yang baik.

"Dengan rancangan Pergub ini diharapkan dapat menekan angka penderita TBC di Kaltim," pungkasnya. **(adv/vic)**



Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Muallimin dalam menghadiri kegiatan pameran kesehatan. (Nita/media Kaltim)

PELATIHAN PROGRAM IMUNISASI DIHARAPKAN DAPAT LINDUNGI GENERASI MUDA

SAMARINDA- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pelatihan Pengelola Program Imunisasi di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kaltim. Acara pelatihan ini akan digelar selama dua pekan, yakni mulai 25 September hingga 3 Oktober 2023.

Dalam pelatihan ini dihadiri oleh petugas pengelola program imunisasi dan petugas farmasi dari seluruh Kabupaten/Kota. Serta dihadiri oleh pihak terkait, termasuk Kepala UPTD Bapelkes Kaltim, Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan, serta fasilitator pelatihan.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Dr Jaya Muallimin mengatakan bahwa program imunisasi merupakan salah satu upaya penting dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa program imunisasi bukan hanya tugas rutin, melainkan juga investasi jangka panjang dalam menjaga kualitas hidup generasi muda. Sehingga diharapkan bahwa pelatihan ini akan memberikan peserta pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang lebih mendalam tentang pengelolaan program imunisasi, sehingga

program ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

"Program imunisasi memerlukan kerjasama yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat. Pentingnya berbagi pengalaman, berdiskusi, dan bertanya sebagai cara terbaik untuk memahami isu-isu terkini dalam program imunisasi," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya, Pada Kamis (28/9/2023).

Diharapkan melalui pelatihan ini akan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Dengan kerja keras, dedikasi, dan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan tujuan bersama untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan masyarakat melalui program imunisasi dapat tercapai.

"Semoga program imunisasi di Kaltim semakin berhasil dalam melindungi generasi muda dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi," tutup Dr Jaya. (adv)

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M,PP
SEKDA PROV KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PU GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala
Dinkes
Kaltim
Dr.dr.H.Jaya
Muallimin,
Sp.KJ,M.
Kes,MARS

DINKES KALTIM TARGET TURUNKAN STUNTING

SAMARINDA – Momen Pelatihan dan Tata Laksana Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Timur 2023 Angkatan II yang digelar 4 hingga 9 September 2023, menjadi momen penting bagaimana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim menyeriusi penanganan Stunting di Bumi Etam

Dalam sambutannya, Kepala Dinkes Kaltim Dr.dr.H.Jaya Muallimin, Sp.KJ,M.Kes,MARS, menjelaskan, sesuai dengan RPJMN 2020-2024, target indikator pembangunan kesehatan adalah menurunkan stunting menjadi 14% dan menjadi 7% pada tahun 2024.

Secara luas ia menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tiga masalah gizi pada balita (triple burden) yaitu stunting dan wasting, overweight, serta defisiensi zat gizi mikro (Global Nutrition Report, 2018).

“Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 terdapat 10,2% balita wasting atau kasus gizi kurang,

3,5% diantaranya severe wasting atau gizi buruk,” sebutnya.

Ditambahkan, tingkat kematian dan kesakitan anak dengan gizi buruk lebih tinggi dibanding anak dengan gizi baik. Menurutnya, perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang.

“Kasus gizi buruk masih banyak ditemui di masyarakat, namun kasus yang dilaporkan dan yang mendapat perawatan masih rendah,” katanya.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya balita gizi buruk yang mendapat perawatan antara lain karena, terbatasnya akses layanan kesehatan, belum banyak fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan balita sakit secara integratif sehingga kasus gizi buruk tidak terdeteksi.

Kemudian, ketidakmampuan pemberi layanan dalam tata laksana gizi buruk, dan Pelaporan yang tidak lengkap.

“Terakhir, dikarenakan rendahnya kesadaran keluarga untuk membawa balita gizi buruk ke tempat pelayanan kesehatan,” jelasnya

Untuk itu Dinkes tak tinggal diam. Dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan tatalaksana balita sakit, Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk pada Balita yang mengintegrasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan.

“Serta adanya program pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita atau end user yang mengacu pada pedoman sejak tahun 2019,” paparnya. **(rls/adv)**

Editor : Adhi Abdhian



Peserta Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kaltim. (dok. Dinkes kaltim)

Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk, Strategi Tekan Stunting

SAMARINDA—Target menurunkan angka stunting di Kaltim, menjadi benang merah pelaksanaan Pelatihan & Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kaltim di Ibis Hotel, Senin (11/9/2023).

Dalam upaya penanggulangan gizi buruk dan tatalaksana balita sakit, Kementerian Kesehatan telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Balita Gizi Buruk pada Balita yang mengintegrasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita (end user) mengacu pada pedoman sejak Tahun 2019.

Kepala Dinkes Kaltim Dr.dr.H. Jaya Mualimin, Sp.KJ,M.Kes.,MARS, pada momen itu menekankan, pada 2020 dan 2021, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan revisi pada pedoman dan buku bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Modul Gizi Buruk Untuk dapat memberikan tatalaksana balita sakit secara komprehensif sesuai pedoman tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas bagi fasilitator dan tenaga kesehatan pelayanan kesehatan sebagai tim layanan kesehatan

pada anak di Puskesmas agar sesuai standar.

“Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan prevalensi balita kurang gizi (underweight) dari 16,6% menjadi 14,7%, penurunan prevalensi balita gizi kurang (wasting) dari 11,6% menjadi 7,5%, penurunan prevalensi balita gemuk (overweight) dari 12,6% menjadi 9,4% namun terjadi peningkatan prevalensi balita pendek dari 27,6 % menjadi 29,4%, paparnya

Sedangkan pada Riskesdas 2018 ia menunjukkan capaian kinerja gizi yang masih kurang optimal seperti proporsi BBLR pada anak 0 - 59 bulan sebesar 7,1%, proporsi resiko KEK pada ibu hamil sebesar 11,5%, persentase IMD pada bayi dan anak usia 0-23 bulan sebesar 66,1% persentase bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif sebesar 55,2% dan persentase balita mendapat vitamin A mencapai 55,7%.

“Hasil Survei Status Gizi Balita tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan prevalensi stunting mengalami peningkatan yaitu sebesar 27,1% dari tahun 2021 sebesar 26,4%. Prevalensi gizi kurang (wasting) dari 7,1% menjadi 7,7%. Prevalensi underweight dari

17,0% menjadi 17,1%. Adanya peningkatan masalah gizi untuk 3 indikator,” sebutnya.

Menurutnya, Balita gizi buruk masih ditemukan di beberapa tempat baik dalam bentuk kwashiorkor, marasmus atau marasmus kwashiorkor, hal ini merupakan masalah kita bersama yang dicegah dan tanggulang bersama pula. Oleh karena itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan secara profesional sesuai kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan kasus gizi buruk, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan Pelatihan Pencegahan Dan Tatalaksana Gizi Buruk Pada Balita agar tenaga kesehatan mampu melakukan pencegahan dan tatalaksana gizi buruk pada balita.

“Kami menyambut baik diadakannya kegiatan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Tenaga Pelayanan Balita di Puskesmas dan Rumah Sakit yang nantinya diharapkan setelah kegiatan ini peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini,” harapnya. **(rls/rs1)**

Editor Adhi Abdhian



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PGUBERBUK KALTIM

dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Dinkes Kaltim turut menghadiri kegiatan pameran kesehatan di atrium bigmall. (Nita/Media Kaltim)

DINKES KALTIM DUKUNG KEGIATAN PAMERAN KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT

SAMARINDA- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengapresiasi kegiatan Pameran Kesehatan dengan tema "Samarinda Sehat Menuju Kota Peradaban", pada Kamis (28/9/2023) di Atrium Bigmall Jalan Untung Suropati.

"Saya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Selain pameran kesehatan juga ada kegiatan seminar, yang bertujuan untuk mensosialisasikan program kesehatan di Kota Samarinda," jelas Kepala Dinkes Kaltim Dr. Jaya Muallimin, Kamis (28/9/2023).

Kemudian juga, di dalam pameran kesehatan tersebut ada layanan 119 yang mana berguna untuk panggilan cepat untuk menangani kejadian yang darurat.

"Layanan 119 juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses kesehatan," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui Dinas Kesehatan Kaltim sangat mengapresiasi kegiatan ini.

Dr. Jaya juga menyarankan, agar agenda serupa ini dapat digelar rutin setiap tahunnya.

"Karena tanpa kegiatan seperti ini masyarakat tidak tahu apa yang sedang dilakukan puskesmas dan Dinkes Kota Samarinda," imbuhnya.

Lebih lanjut, mengharapkan Kabupaten/Kota di Kaltim mengenalkan dalam bentuk pameran ataupun sosialisasi dalam bentuk yang lebih terjangkau oleh masyarakat.

"Karena keterbatasan waktu, terkadang mereka harus ke kantor dinas atau puskesmas kecuali mereka sakit. Seperti di mal ini banyak masyarakat datang," bebernya.

Diharapkan, masyarakat bisa kenal lebih dekat sehingga jika mereka tanpa sakit pun bisa konsultasi ke puskesmas yang ada di Kota Samarinda.

Kendati demikian, ada 20 puskesmas setiap wilayah di Kota Tepian ini mengikuti pameran kesehatan dengan cara membuka stand.

"Dan program yang ada di setiap Puskesmas itu diperlihatkan ke masyarakat," tutup Dr. Jaya. **(Adv)**

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari